

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa

(Studi Pada Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

Fitroh Aziz Zulkarnain

NIM : 0810313023



Dosen Pembimbing:

Dr. Moch. Makmur, MS

Drs. Suwondo, MS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Januari 2015

Jam : 08.00

Judul : **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

Disusun Oleh : FITROH AZIZ ZULKARNAIN

0810313023


DAN DINYATAKAN LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Anggota


Dr. Moch. Makmur, MS
NIP. 19511028 19808 1 002


Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota

Anggota


Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001


Dr. Abdullah Said, M. Si
NIP. 19570911 198503 1 003

CURRICULUM VITAE

Nama : Fitroh Aziz Zulkarnain

NIM : 0810313023

Tempat/Tgl Lahir : Malang, 28 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Joyo Taman Sari 1/13 rt.06 rw.06 Kel.Merjosari Malang

Email : piterohscratch@gmail.com

Pendidikan : 1. MIJS Malang Lulus Tahun 2002

2. SMP N 13 Malang Lulus Tahun 2005

3. SMA N 2 Batu Lulus Tahun 2008

4. Universitas Brawijaya Lulus Tahun 2015



MOTTO

Jangan pernah meremehkan suatu hal apapun itu

Fitroh Aziz Zulkarnain Sugianto



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Selorejo
Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Fitroh Aziz Zulkarnain Sugianto

NIM : 0810313023

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -



Malang, 21 Januari 2015

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Moch. Makmur, MS
NIP. 19511028 19808 1 002

Drs. Suwondo, MS
NIP. 19511028 19808 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 21 Oktober 2014



Fitroh Aziz Zulkarnain

SUMMARY

In order to help implement the authority to regulate and administer the interests of the public as well as the establishment of democracy, then formed's consultative board (bpd) of the legislation, the agency for control, and collectors and their aspirations of the people. Meanwhile, head village of the country for the leadership of a major role in determining the height and more regulation no.6 / policy (law) the administration of 2014.

The agency 's consultative functions to accommodate public aspirations, which set with the head of the regulation and the function as it should be, the villagers were protected by the vices in established.

The government's performance in the implementation of the supervised by established. Problems that occur on the allocation of selorejo in malang, such as permasalahan-permasalahan that are empirical or based on an everyday life to be better.

Established in the village of selorejo good enough to be in this report, the members have established criticism and suggestions given by the villagers to the village chief then it is continued to find a way out of the problem faced by involving the role of the people and then the active society the public figures to be discussed in the indonesia 's consultative village.

Several factors in support of the country 's consultative board (bpd) and called the village which has been taken over and that could explain the conclusion of the process, which is key in the village of good relations is established by the government to the leader of the village, as well as a good relations with the society.

Economy performance of several factors 's consultative board (bpd) with the head of the regulation on rural village that has been described above, and explain the main thing is the domination of the economy are in the process of drafting the village of the country, and is much less active role of the people in the village of the country.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

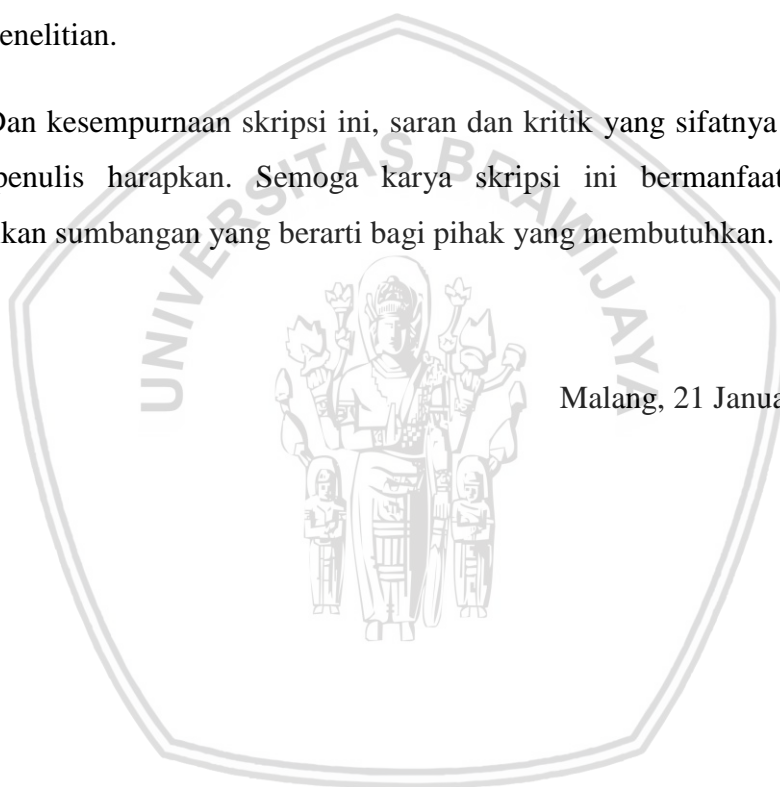
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Orang Tua Tercinta Ayahanda tercinta Sugiyanto dan Ibunda tercinta Mufidah yang selalu memberikan dukungan, serta doanya yang selalu tercurahkan sepanjang waktu.
2. Saudara tercinta Abdul Havidh Yusuf yang juga selalu memberikan dukungan dan doanya.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Dr. Moch. Makmur, MS, dan Bapak Drs. Suwondo, MS selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing serta meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga diberikan Rahmat Allah atas jasa-jasanya.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

7. Kepada seluruh teman-teman se angkatan 2008 yang telah luar biasa membantu peneliti dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi khususnya Khusnu, Naufal, Hadan, Cahyo Timur dan semuanya yang belum disebutkan.
8. Kepada Kantor Desa Selorejo Kabupaten Malang yang selama ini sangat membantu peneliti dalam memperoleh data dan bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian.
9. Kepada seluruh warga Selorejo yang bersedia membantu peneliti dalam memperoleh data dan bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian.

Dan kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Januari 2015



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Administrasi Publik	12
1. Pengertian Administrasi	12
2. Pengertian Administrasi Publik	13
3. Kegiatan Administrasi Publik	15
B. Otonomi Daerah	16
1. Pengertian Otonomi Daerah	16
2. Ciri-ciri Otonomi Daerah	18
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah	19
C. Pemerintahan Desa	19
1. Pengertian Desa	19
2. Otonomi Desa	20
3. Struktur Pemerintahan Desa	21
D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	27
1. Pengertian Badan Permusyawaratan (BPD).....	27
2. Kewajiban dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	32
3. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa	33
E. Peraturan Desa	35
1. Konsep Peraturan Desa	35
2. Asas-asas dan Materi Muatan Peraturan Desa	36
3. Proses Pembentukan Peraturan Desa	37
4. Fungsi Peraturan Desa	38
F. Kinerja	42
1. Pengertian Kinerja	42
2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	46

3. Pengukuran Kinerja	47
4. Tujuan Penilaian Kinerja	50

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 52

A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	56
D. Jenis Data Dan Sumber Data	57
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	58
1. Observasi	58
2. Wawancara	59
3. Dokumentasi	59
F. Instrumen Penelitian	59
G. Metode Analisis Data	60

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

A. Gambaran Umum	62
1. Kondisi Geografis Desa Selorejo	62
2. Sejarah Desa Selorejo	63
3. Misi Desa Selorejo	63
4. Visi Desa Selorejo	64
5. Batas Wilayah Desa Selorejo	64
6. Keadaan Demografi Desa Selorejo	75
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	86
1. Kinerja BPD dilihat dari kemampuan anggota	86
a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat	86
b. Semangat kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa ...	88
2. Proses Kinerja BPD dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa	90
a. Usulan Pembentukan Peraturan Desa	90
b. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa	92
c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa	94
d. Perumusan Peraturan Desa	97
e. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Desa	100
f. Pengesahan Peraturan Desa	105
g. Pengundangan Peraturan Desa	107
h. Penyebarluasan Peraturan Desa	108
3. Output dan outcome Peraturan Desa yang Dihasilkan Oleh BPD dan Kepala Desa Selorejo, Jika Ditinjau Dari	110
a. Output Jenis Peraturan Desa di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	112
b. Outcome Peraturan Desa yang Dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	115
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa	122
a. Faktor Pendukung	123
b. Faktor Penghambat	125
C. Pembahasan	127

1. Kinerja BPD Dilihat dari Kemampuan Anggota	127
a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat	128
b. Semangat kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa ...	130
2. Proses Kinerja BPD dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa	138
a. Usulan Pembentukan Peraturan Desa	138
b. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa	139
c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa	141
d. Perumusan Peraturan Desa	143
e. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa	145
f. Pengesahan Peraturan Desa	146
g. Pengundangan Peraturan Desa	148
h. Penyebarluasan Peraturan Desa	149
3. Output dan Outcome Peraturan Desa yang Dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa Selorejo, Jika Ditinjau dari	150
a. Output jenis peraturan desa di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	150
b. Outcome peraturan desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	152
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa	154
a. Faktor Pendukung	154
b. Faktor Penghambat	155
BAB V. PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Selorejo	62
Gambar 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Selorejo	79
Gambar 3. Kondisi Balai Desa Selorejo	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Tanah Desa Selorejo Tahun 2014	66
Tabel 2. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014	67
Tabel 3. Data Penduduk Desa Selorejo Menurut Usia Tahun 2014	68
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selorejo Tahun 2014	69
Tabel 5. Mata Pencarian Penduduk Desa Selorejo Tahun 2014	70
Tabel 6. Data Penduduk Menurut Agama Tahun 2014	71
Tabel 7. Nama Aparat Desa Selorejo	80
Tabel 8. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
Desa selorejo	83
Tabel 9. Jenis-jenis Peraturan yang Dihasilkan Desa Selorejo	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan reformasi yang terjadi di Indonesia, maka desa juga dituntut melakukan reformasi. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan mendasar pada paradigma system pemerintahan, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas (*top down*), kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa (*bottom up*). Dalam paradigma baru tersebut, Desa menjadi garda depan dari sistem pemerintahan Indonesia yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta keberadaannya langsung berada dibawah pemerintah kabupaten.

Indonesia melakukan perubahan system pemerintahan dengan memfokuskan kepada pola otonomi. Pola otonomi ini menjadi angin segar terhadap dinamika dan suasana dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dimana desa sebagai struktur pemerintah dengan hierarki paling rendah memiliki hak serta wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan prinsip keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa secara hukum diakui memiliki otonomi. Pengakuan Desa menjadi kesatuan hukum otonom dan dapat dilihat pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan sendiri. Secara fundamental kebebasan dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri juga diatur dijelaskan pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana desa mempunyai kebebasan dalam mengatur Pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, Pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Keuangan Desa dan Kerjasama antar desa. Sebagai konsekuensi munculnya otonomi daerah ini pada akhirnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap institusi-institusi demokratis yang ada dan tingkat transparansi pengelolaan system pemerintahan desa. Pada aspek pemerintahan desa juga berdampak meningkatnya kreativitas aparatur desa dalam mengelola dan mengatur serta menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam rangka membantu melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta sebagai perwujudan demokrasi, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana fungsinya sarana penyalur aspirasi masyarakat desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan desa mempunyai peranan yang lebih tinggi dan besar dalam menentukan peraturan/kebijakan (Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa).

Posisi antara Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ini tidak seimbang sehingga lembaga ini tidak bisa mengeliminir tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa tetapi lembaga ini mendukung keinginan Kepala Desa yaitu dengan ikut mengesahkan atau menyetujui setiap peraturan atau kebijakan yang diusulkan oleh Kepala Desa tanpa melihat terlebih dahulu apakah peraturan atau kebijakan yang diambil tersebut berguna untuk masyarakat atau tidak. Dengan melihat fenomena ini, keberadaan LMD tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat desa, lembaga ini hanya dijadikan lembaga formil oleh pemerintah desa.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan setara sebagai mitra Kepala Desa. Sehingga Kepala Desa bukan lagi menjadi pusat dari dinamika politik desa, melainkan ada lembaga lainnya yang dapat dijadikan mitra kerja Kepala Desa yaitu BPD. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui BPD.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna Undang-undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang. Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 pasal 104 “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sedangkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dalam fungsinya sebagai Badan Legislatif, BPD bertugas untuk membentuk Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka menampung dan menyalurkan partisipasi dan aspirasi masyarakat desa. Kepala Desa dan BPD adalah lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Desa. Dalam proses pembentukan Peraturan desa, Kepala Desa dan BPD harus benar-benar memperhatikan keadaan yang berkembang baik sosial budaya, ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat. Karena aspirasi dan partisipasi yang berkembang merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Desa adalah sebagai “Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya”. Peraturan Desa berisi tentang “seluruh muatan dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Pasal 4).

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa baik yang berasal dari inisiatif BPD maupun yang diajukan oleh Pemerintah Desa ada hal yang paling utama yakni harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa dari berbagai lapisan masyarakat. BPD harus sungguh-sungguh mencari atau menerima masukan dari segala lapisan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran dan taraf kehidupan masyarakat desa.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa diawasi oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Walikota. Untuk BPD di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara

pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Permasalahan yang muncul di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu berupa permasalahan-permasalahan yang bersifat empiris, atau berdasarkan kehidupan sehari-hari yang mutlak untuk diperbaiki, seperti permasalahan mengenai jalan desa yang belum diaspal, perbaikan saluran air, maupun pengoperasian PUSKESDES (Pusat Kesehatan Desa) yang seharusnya intens dijalankan, hal ini merupakan permasalahan-permasalahan yang penting untuk diselesaikan guna memperlancar aktifitas kehidupan masyarakat di Desa Selorejo, selain itu terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain:

1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat desa.
2. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa.
3. Fungsi kontrol ada pada badan permusyawaratan desa, tetapi dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.
4. Sebagian besar badan permusyawaratan desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah desa.

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah desa termasuk pemerintah desa di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga

legislasi dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Upaya untuk menjaga hubungan baik tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kinerja pemerintah desa yang bersih dan memiliki tujuan sebagai aparatur yang memberikan jaminan atas kesejahteraan bagi masyarakat.

Bentuk nyata dari upaya tersebut yaitu dengan selalu menjaga hubungan baik antara BPD dan kepala desa sebagai mitra kerja dengan tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat desa. Apabila tujuan tersebut dapat terwujud maka dapat menjadi tolak ukur atas keberhasilan yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam penilaian atas kinerja BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Berdasarkan dengan uraian dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa(Studi Pada Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

2. Bagaimana Peraturan Desa yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses prnyusunan peraturan desa di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai tugas dan fungsinya.
2. Untuk menganalisis Peraturan Desa yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa.

D. Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi, adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai:

1. Manfaat Akademisi

- a. Penulisan ini dapat dijadikan sebagai kajian studi administrasi publik, Khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan terutama tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak meneliti mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sekaligus bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat mengenai BPD didalam meningkatkan peran serta dalam kegiatan-kegiatannya yang ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara jelas isi dari skripsi ini maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang penelitian dan alasan judul tersebut diambil yang kemudian akan dijelaskan dan diperinci menjadi rumusan masalah. Bab ini juga terdiri dari Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Pembahasannya.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan konsep-konsep, pendapat para ahli dari buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti yang berfungsi untuk memecahkan masalah tersebut.

Bab III : METODE PENELITIAN

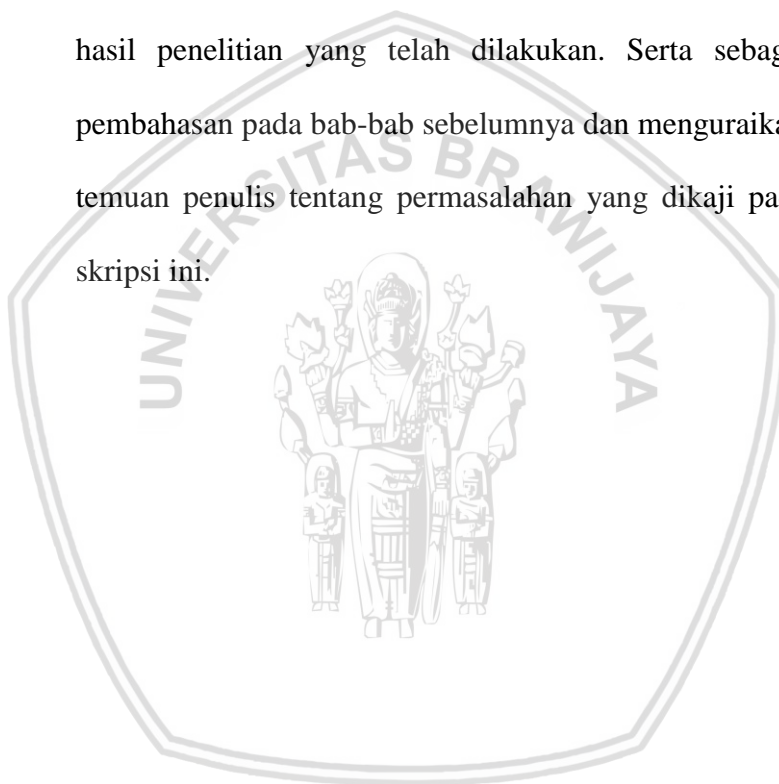
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Diantaranya dalam bab ini diuraikan tentang jenis-jenis penelitian yang dipakai, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas secara lebih dalam, detail, rinci mengenai data-data yang dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah dihimpun tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:9) menunjukkan variasi batasan tentang administrasi. Administrasi menurut pendapat A. Dunsire, dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Selanjutnya pendapat Trecker yang dikutip juga oleh Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa “administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama-sama orang dan materil melalui koordinasi dan kerjasama” Donovan dan Jackson (1991:10).

Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff, dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi,

mengevaluasi program, dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Batasan-batasan tersebut di atas secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke pihak atasan dan sebagainya. Dan agar lebih meyakinkan lagi, dapat dilihat definisi administrasi dalam *The Public Administration Dictionary* (Chandler dan Plano, 1988:3).

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional dan kerjasama tersebut dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tanpa adanya salah satu dari faktor itu maka tidak akan ada administrasi.

2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, serta administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditunjukkan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan (Chandler dan Plano, 1988:29).

Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi “administrasi Publik karena administrasi publik merupakan suatu proses yang kompleks (Lemay, 2002:10). Menurut Stillman II dalam Yeremias T Keban (2008:45) bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi dan bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Dimock, Dimock dan Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.
- b. Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai the work of government atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan publik.
- c. Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek the accomplishing side of government dan seleksi kebijakan publik.
- d. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup tiga cabang yaitu, yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
- e. Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi syarat-mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- f. Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara melalui pembuatan dan kemudian implementasi serangkaian kebijakan. Fokus dari administrasi publik adalah pada pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. administrasi publik adalah suatu sistem dalam negara, dan terdiri dari berbagai sub sistem antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, material dan lain sebagainya. Bersama dengan sistem yang lain seperti politik, sistem hukum tata negara dan pemerintahan, administrasi publik merupakan sub sistem dari sebuah sistem dari sistem nasional suatu negara.

3. Kegiatan Administrasi Publik

Yeremias T. Keban (2008:17) menjelaskan bahwa:

“apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (public service), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan” Yeremias T. Keban (2008:17).

Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, perijinan, dan sebagainya. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik, dan

pembangunan kualitas manusia, yang kesemuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Selanjutnya secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga departemen dan non departemen, sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tersebut, dipekerjakan berbagai macam personel mulai dari penjaga malam sampai dokter ahli bedah rumah sakit umum, atau mulai pegawai tanpa bawahan sampai para manajer publik tingkat atas yang memiliki banyak bawahan. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit, maupun oleh pejabat non struktural yang tidak memimpin suatu unit.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Apabila kegiatan ini kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu melaksanakannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya. administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam

melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauannya, serta tentunya mempunyai bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya dengan tidak melanggar Undang-Undang.

Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin *outos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Dari sudut ini beberapa sarjana kemudian memberikan artian otonomi sebagai “*zetwetging*” atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Wijaya memandang otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wijaya (2002:76)

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan daerah otonom seperti yang dicantumkan pada pasal 1 ayat 6 UU No 6 Tahun 2002 merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengakuan otonomi yang dimiliki desa seperti dijelaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai dampak yang besar terhadap system pemerintahan yang sudah ada. Dimana desa pada akhirnya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional. Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.

Selain pemberian kebebasan terhadap desa untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemberian otonomi juga berdampak pada diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

2. Ciri-ciri otonomi Daerah

Menurut UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa ciri-ciri otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Daerah memiliki wewenang untuk memilih, menetapkan siapa nantinya yang akan memimpin di daerahnya

- b. Daerah memiliki hak untuk membuat suatu kebijakan daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari luar
- c. Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan daerah, baik itu dalam hal penerimaan, pengeluaran dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah

Untuk menjalankan otonomi daerah dengan optimal ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Kaho beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- a. Manusia pelaksanaannya harus baik
- b. Keuangannya harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus cukup dan baik
- d. Organisasi dan Manajemennya harus baik. Kaho (1995:60)

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota”. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa setidaknya memuat beberapa ciri berikut:

- 1) Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam
- 2) Kehidupan petani sangat bergantung pada musim
- 3) Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja

- 4) Struktur perekonomian bersifat agraris
- 5) Hubungan antar anggota masyarakat desa berdasar ikatan kekeluargaan
- 6) Perkembangan sosial relatif lambat
- 7) Kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum informal
- 8) Norma agama dan adat masih kuat. (Soerjono Soekanto, 2003:10)

2. Otonomi Desa

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa untuk membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Memang sudah waktunya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Ada dua hal penting yang dipakai untuk memahami persoalan demokratisasi di pedesaan. Yang pertama adalah mengenai perlunya sikap moderasi dalam memperjuangkan demokrasi, dan yang kedua tentang perlunya kekuatan rakyat.

Persoalan yang pertama mengisyaratkan bahwa upaya demokratisasi adalah upaya berkelanjutan secara rasional dan berjangka panjang, bukan tindakan yang bernaflu dan sekali jadi. Dalam beberapa hal bahkan memerlukan tindakan "*intermental*". Yaitu membentuk bangunan demokrasi. Sedangkan yang kedua menegaskan bahwa proses demokratisasi harus diupayakan, tidak bisa ditunggu, oleh karena itu memerlukan pemupukan kekuatan dari dasar pelaksanaan otonomi desa.

Dalam beberapa hal, ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa mengharuskan peranan BPD mencakup kedua landasan di atas. Yang mempunyai tujuan bahwa BPD harus mampu menjaga modernisasi terhadap upaya-upaya demokratisasi yang dibebankan kepadanya, tanpa meninggalkan aspek pemberdayaan masyarakat. Nilai strategis BPD bukan hanya karena

kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki, tetapi fakta yang menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah dan penduduk Indonesia berada di pedesaan.

3. Struktur Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pasal 1 ayat 7 menyatakan pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pemerintahan desa sebagai "penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 tahun, dan dapat diperpanjang

lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi prasyarat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
- 3) Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- 4) Berusia paling rendah 25 tahun
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- 6) Penduduk desa setempat
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya
- 9) Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
- 10) Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Sedangkan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa,

mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa

Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada kepala desa dan dipimpin oleh carik desa. Tugas Sekretaris Desa yaitu menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

a) Carik desa mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh pamong desa.
- 2) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Pamong desa.
- 3) Melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data, dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- 5) Melaksanakan administrasi pertanahan.
- 6) Menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya.

b) Urusan umum, bertugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga desa serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. urusan umum mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program serta menyelenggarakan ketatausahaan dan kearsipan
- 2) Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa
- 3) Menyusun program serta melakukan perlengkapan dan inventaris desa.

c) Urusan pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. Urusan umum mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum
- 2) Menyusun rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- 3) Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
- 4) Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapat lain
- 5) Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil
- 6) Membantu carik desa dalam pengadministrasian ketertiban.

d) Urusan pembangunan dan perekonomian, bertugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa serta menyusun laporan di bidang ekonomi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Urusan pembangunan dan perekonomian mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa
- 2) Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang ekonomi, distribusi, dan produksi.
- 3) Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan
- 4) Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan

e) Urusan keuangan, bertugas menyusun rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta menyusun laporan di bidang keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Urusan keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program dan rencana APB-Des
- 2) Menyusun program dan pengadministrasian keuangan desa
- 3) Menyusun rencana pertanggung jawaban kepada Kepala Desa
- 4) Menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah desa
- 5) Membelanjakan kebutuhan Pemerintah desa
- 6) Membuat pertanggung jawaban keuangan Pemerintah desa
- 7) Menyetor uang milik Pemerintah daerah dan negara
- 8) Menggali sumber-sumber keuangan desa.

f) Urusan kesejahteraan rakyat, bertugas menyusun rencana, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kesejahteraan desa serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan di bidang keagamaan, KB, kesehatan, dan pendidikan masyarakat
- 3) Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
- 4) Menyusun program dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan rakyat.

Petugas Pelaksana Teknik Lapangan

Petugas Pelaksanaan Teknik Lapangan adalah unsur pelaksana yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- a) Kepala Dusun, mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa
 - 2) Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa
 - 4) Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong
 - 5) Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah
- b) Modin, bertugas menangani masalah-masalah yang timbul di desa yang berupa masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Modin memiliki beberapa fungsi, yaitu :
- 1) Menangani perkawinan dan perceraian
 - 2) Melayani masyarakat dalam urusan kelahiran dan kematian
 - 3) Mengatur upacara-upacara adat dan keagamaan
 - 4) Membimbing dan membina kegiatan-kegiatan keagamaan
 - 5) Membina kerukunan antar umat beragama
- c) Pamong Tani, bertugas mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Pamong desa berfungsi :
- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petani mengenai pola tanam dan sistem pengairan yang benar
 - 2) Mengkoordinasikan program-program penghijauan, turusjalan dan hutan rakyat
 - 3) Menyelenggarakan kebun bibit desa
 - 4) Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sapi
 - 5) Mengatur pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan perikanan
 - 6) Mengatur sistem pengairan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap

sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 209 Tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BPD sendiri merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia dimana anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pasal 1 ayat 9 bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Dalam rangka mengangkat dan memilih anggota diatur dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah/dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat”. Serta pasal 2 ayat 2 yang menyatakan “Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya”.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan diatur pada pasal 3 Perda Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang.
- c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang.
- d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
- e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Lebih terperinci menjelaskan persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD selain menjadi penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, juga diatur

pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 yang memenuhi syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat ;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- e. Sehat jasmani dan rohani ;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

Dalam rangka penetapan anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 5 antara lain.

- a. Penetapan anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.
- b. Mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersangkutan.
- c. Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa.
- d. Hasil musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan anggota BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri daftar hadir rapat.

Keanggotaan BPD harus berasal dari masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, yang menyatakan bahwa di tingkat desa dibentuk LMD, kemudian diganti dengan Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa di dalam pemerintahan desa

dibentuk Badan Perwakilan Desa. Yang pada akhirnya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menggantikan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dalam pemerintahan desa tidak lagi dikenal adanya Istilah Badan Perwakilan Desa, yang ada adalah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Perwakilan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berbeda jika dilihat dari segi kedudukan, fungsi yang ditetapkan, dan keanggotaan yang di canangkan.

Berdasarkan perbedaan antara UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 terlihat bahwa Badan Perwakilan Desa sudah berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, Perubahan tersebut membuat BPD menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 kehilangan fungsi pengawasannya karena pada pasal 209 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 sudah jelas tercantum fungsi BPD, yaitu menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan yang sebelumnya dimiliki oleh BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpindah menjadi tanggung jawab Bupati. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alur pertanggung jawaban Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang yang baru tersebut Bupati merupakan representasi langsung dari rakyat sehingga fungsi pengawasan pemerintah desa dipegang oleh Bupati.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, Sementara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertanggung

jawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui tembusan Camat. Sementara kepada lembaga legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Desa hanya memberikan keteranganlaporan pertanggung jawaban. Mekanisme tersebut mirip dengan sistem dalam pertanggung jawaban kepala daerah.

2. Kewajiban Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa.

Badan permusyawaratan desa atau BPD seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 34 Tentang Desa Pasal 29 mempunyai atau berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu kewenangan BPD yang lain juga diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 diatur pada pasal 8 yang berbunyi.

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun Tata Tertib BPD

Fungsi BPD pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 diatur pada pasal Pasal 9 yang berbunyi:

BPD berfungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak BPD Seperti yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 diatur pada pasal Pasal 13 yaitu butir a. meminta

keterangan kepada Pemerintah Desa dan butir b. menyatakan pendapat.

Sedangkan penjelasan hak yang dimiliki oleh setiap anggota diatur pada pasal 15 :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Kewajiban yang dimiliki BPD sesuai dengan yang diatur pada Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 diatur pada pasal 14.

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3. Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa dan merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 200 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa” dan dalam Pasal

11 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 menyatakan :“Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD” dari pernyataan diatas maka dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD bekerja samadengan pemerintah desa dan keduanya merupakan mitra kerja yang sejajar.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk “memproses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh masyarakat desa” (Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014) dan “Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan” (Kepemendagri No. 64 Tahun 1999). BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Jika salah satu dari Badan Permusyawaratan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya.

E. Peraturan Desa

1. Konsep Peraturan Desa.

Peraturan desa pada dasarnya merupakan sebuah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seperti yang dijelaskan pada UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 8 menyatakan peraturan desa “Peraturan Desa/ Peraturan oleh badan setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya”. Dalam pengklasifikasian hasil peraturan yang telah selesai di buat juga termasuk ke dalam produk hukum daerah seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

1. Jenis dan hierarki perundang-undangan adalah sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
 - a. Peraturan Daerah Provinsi oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi bersama Gubernur
 - b. Peraturan daerah kabupaten/ kota dibuat oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten bersama bupati/ walikota
 - c. Peraturan desa/ peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pembuatan Peraturan desa yang wajib di bentuk juga diatur dalam beberapa pasal pada PP No 72 Tahun 2005 tentang desa, antara lain :

- a. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 3)
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM) (pasal 64 ayat 2)

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (pasal 73 ayat 3)
- d. Pengelolaan keuangan desa (pasal 76)
- e. Pembentukan badan usaha milik desa (pasal 78 ayat 2)
- f. Pembentukan badan kerjasama (pasal 82 ayat 2)
- g. Lembaga kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2)

2. Asas-asas dan Materi Muatan Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 56, “Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan,
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- d. Dapat dilaksanakan,
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan,
- g. Keterbukaan,

Selain itu, materi Muatan yang terkandung dalam Peraturan Desa sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengandung asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas tersebut, Peraturan Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Pasal 4 ayat (1): “materi muatan Peraturan adalah seluruh muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

3. Proses Pembentukan Peraturan Desa

Melihat hierarki yang dimiliki peraturan desa berada pada tingkat yang paling bawah dan harus tunduk pada perundang-undangan atau perda yang berlaku di atasnya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 5 bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Oleh karenanya badan permusyawaratan

desa (BPD) bersama dengan kepala desa yang bertugas untuk menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus berhati-hati dalam membentuk dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah peraturan.

Selain itu di dalam tata cara pembuatan sebuah peraturan desa, tidak bisa disamakan dengan daerah/ wilayah lain terlebih dengan adanya system otonomi daerah yang membebaskan setiap wilayah untuk bebas berekspresi dan berkreasi dalam membangun daerahnya dengan tidak melanggar perundang- undang. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan” sehingga untuk Kabupaten Malang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 tahun 2007 tentang peraturan desa.

4. Fungsi Peraturan Desa

Peraturan Desa jika dilihat dari segi proses pembentukannya maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa berfungsi sebagai:

- a. Peraturan Desa sebagai Sarana Penampung dan Penyalur Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Desa, masyarakat desa dapat berpartisipasi secara langsung dan aktif untuk memberikan masukan, saran dan aspirasinya terhadap Pemerintahan Desa agar segala masukan dan saran yang disampaikan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan aspirasi, inspirasi dan partisipasi masyarakat desa.

Dengan demikian Peraturan Desa mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi, inspirasi, dan partisipasi masyarakat secara legal menurut hukum yang berlaku. Karena tanpa adanya aspirasi dan partisipasi masyarakat yang baik, tidak akan dapat terbentuk Peraturan Desa yang berkualitas.

b. Peraturan Desa berfungsi sebagai kontrol

Peraturan Desa berfungsi sebagai sarana kontrol penggunaan uang kas desa. Pemerintahan Desa dalam menggunakan uang kas desa yang dijelaskan dalam Peraturan Desa tentang APB-Des perlu mendapatkan kontrol atau pengawasan sebagai pencerminan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menggunakan uang kas desa, yang dijabarkan dalam Peraturan Desa APB-Des harus menjamin kepastian hukum, harus dilaksanakan secara teratur, sistematis, serasi dan seimbang, mendahulukan kepentingan umum, dan Pemerintahan Desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak ada perbedaan di dalamnya.

c. Peraturan Desa Berfungsi Sebagai Sarana Pelaksanaan Desentralisasi

Dengan berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah desa dapat melaksanakan beberapa Peraturan Pemerintah yang berada di atasnya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan sebagai berikut : “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan berlandaskan penjelasan pasal tersebut, maka Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan pendataan penduduk, usaha pertanian, peternakan, kegiatan posyandu, dan lain-lain yang berasal dari Program Pemerintah Pusat.

d. Peraturan Desa Berfungsi Sebagai Sarana Asas Pembantuan

Dengan diterapkannya asas pembantuan, pemerintah desa dapat melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh Pemerintah di atasnya. Tugas-tugas tersebut yaitu:

- 1) Menarik retribusi daerah yang dibebankan kepada Pemerintah Desa;
menarik retribusi rumah makan, retribusi restoran dan lain-lain.
- 2) Menarik PBB

Dalam melaksanakan tugas yang sudah disebutkan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa yang menjadi dasar pelaksanaan di lapangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (9): “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan / atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan / desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu”. Dijelaskan lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 207 adalah: “Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”

- e. Peraturan Desa sebagai Sarana untuk Membentuk atau melakukan Integrasi Kelompok-Kelompok Masyarakat.

Integrasi dapat dijabarkan yaitu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan sikapprakyat atau masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikankeputusan kepada organisasi atau pemerintah. Dalam hubungannya denganPeraturan Desa bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan kewenangannyauntuk mempengaruhi masyarakat dalam usaha membentuk PeraturanDesa dengan tujuan untuk menyatukan tujuan pemerintahdesa yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam hal ini akanterjadi proses saling melengkapi dan terarah dalam mencapai tujuan inti demiperbaiki kepentingan tujuan pembangunan kemasyarakatan danpemerintahan. (Syafie 1991 : 32)

- f. Peraturan Desa berfungsi sebagai Sarana untuk Pendelegasian Wewenang.

Pendelegasian wewenang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 10 ayat (4) yaitu sebagai berikut: “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapatmelimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkatpemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskankepada Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut Pemerintah Desa dapatmelaksanakan urusan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat karenaadanya asas pendelegasian wewenang. Dengan demikian Pemerintah Desajuga mampumenjalankan asas pendelegasian wewenang yang

dituangkandalam Peraturan Desa, dapat dicontohkan yaitu Peraturan Desa yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dengan begitu dapat diaturpendelegasian wewenang aparatur Pemerintah Desa.

F. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Keban “kinerja adalah merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendeikawan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi” (T, Keban 2008:191).

Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai “suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi” Lembaga Administrasi Negara (2000:3).

Konsep tentang kinerja telah diungkapkan oleh para ahli, Moenir yang mendefinisikan “kinerja sebagai hasil kerja seseorang pada kesatuan waktu atau ukuran tertentu” Moenir (2006:76).

Hasil yang dicapai dapat berasal dari seseorang atau kelompok orang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasibuan bahwa “kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kseungguhan” Hasibuan (2001:105).

Tanpa kinerja yang baik ada semua tingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi menjadi sesuatu yang sulit bahkan mustahil.

Dengan prestasi yang ingin dicapai memungkinkannya diperolehnya penghargaan ataupun bentuk-bentuk lain individu-individu tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Siagian bahwa “mutu pekerjaan yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan, bukan saja dalam arti lebih menjamin eksistensi dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi, akan tetapi dalam pencapaian tujuan-tujuan pribadi dari anggota organisasi yang bersangkutan” Siagian (1994:145).

Meskipun pendapat diatas menekankan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu fungsi atau aktifitas dalam waktu tertentu, namun secara umum suatu kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil (*degree of accomplishment*). Pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut perilaku, yaitu hasil yang diarahkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan. Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai visi dan misi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Klasifikasi kinerja ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Swanson dan Holton III yang membagi kinerja atas tiga tingkatan yaitu “kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu” Swanson dan Holton III (1999:73).

Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumberdayanya.

Kinerja Proses, sebagaimana dikatakan oleh Swanson dan Holton III menggambarkan

“suatu proses yang dirancang dalam organisasi akan memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu, di desain sebagai suatu sistem, memilki kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas, dan tepat waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. kinerja individu mempersoalkan tujuan individu sesuai dengan misi organisasi, individu mengalami hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, para individu memiliki mental, fisik dan emosi dalam bekerja, dan mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja” Swanson dan Holton III (1999:73).

Klasifikasi kinerja yang disampaikan diatas membawa suatu implikasi bahwa konsep tentang kinerja seharusnya diartikan secara luas baik dalam tatanan organisasi, dalam proses dan dalam tingkatan individual, dimana semuanya sama-sama penting. Ketiga tingkatan kinerja ini saling terkait dan sama-sama menentukan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga dan mungkin perlu dibudayakan atau bahkan diwajibkan penilaian kinerja dalam tataran organisasi dan proses, dan tidak semata kinerja individu sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Kinerja (*performance*) mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai dari kerja tersebut. Kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional yang diikuti pula dengan pengukurannya yang bervariasi pula karena sangat tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Rogers dalam Mahmudi berpendapat bahwa “kinerja semestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcome of work*), dengan pendapat bahwa hasil kerja memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi” Rogers dalam Mahmudi (2007:6).

Di samping itu, Mahsun mendefinisikan “kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi” Mahsun (2006:25). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menurut Prabu Mangkunegara “kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya” Prabu Mangkunegara (2000:67).

Dari gambaran diatas terlihat bahwa kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana telah ditetapkan oleh institusi. Sedangkan menurut Keban “kinerja program atau kebijakan berkenan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut” (Keban, 2008:210).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Gibson menyatukan terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu:

- a) Variabel individu, yang meliputi kemampuan dan ketrampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur dan jenis kelamin, asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan kinerja;
- b) Variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan struktur dan desain pekerjaan;
- c) Variabel psikologis, yakni persepsi sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit di ukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda satu sama lainnya. Gibson (1996:76).

Uraian dari vaiabel kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab

Adalah kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada

waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

b) Inisiatif

Adalah prakarsa atau kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

c) Jumlah pekerjaan

Variabel ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa pekerjaan itu berbeda-beda satu sama lain dimana beberapa diantaranya lebih menarik dan menantang dibanding lainnya.

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Chandler dan Plano, pengukuran kinerja adalah “... *an evaluation of an employee's progress measures in terms of job effectiveness.....* “ (Chandler dan Plano, 1998:293). Yang mengartikan batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan setiap individu bagi organisasinya, dan tujuannya terdiri atas dua, yaitu memberikan insentif/disinsentif kepada hasil kerja yang dicapai pada masa lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja menurut Mahsun antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian dan sasaran-sasaran organisasi
- 4) Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas) (Mahsun, 2006:26).

Oleh karena sifat dan karakteristiknya, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat laba, tidak hanya efisien dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kelompok *Input*, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Kelompok *process*, adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3) Kelompok *output*, adalah sesuatu yang diharapkan langsung agar dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud
- 4) Kelompok *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- 5) Kelompok *benefit*, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6) Kelompok *impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif (Mahsun 2006:31).

Berdasarkan beberapa aspek kinerja diatas yang harus diukur pada organisasi sektor publik tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor publik ini. Penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibanding dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang agar kemampuannya bisa berada di atas rata-rata.

Jika penilaian kinerja diarahkan untuk memacu kinerja seseorang itu sendiri, maka penilaian kinerja identik dengan upaya memberi motivasi. Motivasi inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memicu produktivitas seseorang. Dengan demikian, kehadiran suatu sistem penilaian yang baik yang ditopang oleh aspek validitas, reliabilitas dan relevansi merupakan kunci yang menentukan efektivitas sebuah proses penilaian kinerja. Hal itu penting untuk menjamin adanya kepuasan

kerja yang dinikmati oleh pihak yang dinilai yang pada gilirannya akan semakin memacu tingkat kinerjanya.

Sistem penilaian kinerja diartikan oleh Siagian sebagai suatu proses penilaian kinerja. Dalam pandangan mereka, proses penilaian kinerja dapat menggunakan pendekatan komparatif, standar-standar absolut, pendekatan tujuan, indeks yang bersifat langsung dan obyektif, penilaian diatas dilakukan dalam rangka:

- a) *Manajemen Development*; memberikan suatu pengembangan pegawai dimasa mendatang.
- b) Pengukuran Kinerja; memberika informasi tentang nilai relatif dari kontribusi individu terhadap organisasi.
- c) Perbaikan kinerja; mendorong individu bekerja lebih efektif dan produktif.
- d) Remunerasi dan benefit; membantu menentukan imbalan dan benefit yang setimpal berdasarkan sistem merit atau hasil.
- e) Identifikasi potensi; membantu promosi.
- f) *Feedback* : menggambarkan apa yang diharapkan dari individu
- g) Perencanaan Sumber Daya Manusia: menilai kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada untuk perencanaan selanjutnya.
- h) Komunikasi: memberikan suatu format dialog antara atasan dan bawahan dan memperbaiki pemahaman tentang tujuan dan masalah-masalah yang dihadapi. Siagian (1994:42).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Siagian bahwa:

“sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prstasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam memberikan imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai dalam menentukan rencana kariernya”Siagian (1994:53).

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja pegawai dan kinerja organisasi. Dismping itu, juga sebagai untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara cepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kompetensinya kepada pegawai sehingga dalam melaksanakan pekerjaan akan lebih baik untuk sekarang dan masa mendatang, serta sebagai

dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penghargaan jasa atas kinerjanya yang baik.

4. Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara adalah:

- a) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
 - b) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan yang terdahulu.
 - c) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, serta meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
 - d) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
 - e) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.
- Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara (2000:67).

Kegunaan penilaian prestasi kinerja karyawan adalah:

- a) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.
- b) Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- c) Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam organisasi.
- d) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi.
- e) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam satu organisasi.
- f) Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga tercipta *performance* yang baik.
- g) Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.
- h) Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan.

- i) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.
 - j) Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (*job decription*).
- Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara (2000:68).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Effendi diartikan sebagai berikut:

”Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya” (Singarimbun dan Effendi, 1989:8).

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Kurt dan Miller yang dikutip dalam Moleong (2000:3) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Lebih lanjut menurut Bogdan dan Taylor juga dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003). Pemilihan metode kualitatif karena dalam penerapannya metode ini bertumpu pada berbagai aliran, tradisi, atau orientasi yang kesemuanya menekankan pentingnya pengembangan dan penyusunan teori yang ditandai oleh strategi induktif-empiris. Hal ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang bertumpukan pada deduksi logis berdasarkan asumsi- asumsi apriori. Ancangan kualitatif senantiasa berakar pada kenyataan empiris, walaupun dapat saja dipahami oleh berbagai tradisi dan orientasi pemikiran yang berbeda- beda.

Keunggulan metode kualitatif lainnya, adalah strategi penyelidikan yang naturalis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (setting) tanpa hipotesis-hipotesis yang ditentukan sebelumnya, teori muncul justru dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (grounded) dalam data (Strauss, 2003). Dilihat dari historis

penggunaan metode kualitatif pertama-tama dikenal dalam studi-studi dari Chicago school di tahun 1910-1940. Selama periode itu peneliti-peneliti universitas tersebut menghasilkan penelitian-penelitian dengan pengamatan terlibat (participant observation) dan berdasarkan catatan-catatan pribadi (personel document). Sampai dengan tahun 1960-an, masyarakat ilmiah telah terbiasa dengan metode participant observation, in-depth interview, dan personel dokumen.

Selanjutnya, penelitian eksplorasi ditujukan untuk: Pertama, mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada. Kedua, mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Ketiga, melakukan evaluasi atau (jika mungkin) membuat komparasi.

B. Fokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah sebagai “pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempresepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti” (Moleong 2000:97).

Penelitian Kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian atau dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama batasan menentukan kenyataan guna mempertajam fokus, kedua penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus penelitian.

Fokus penelitian sangat penting untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan, adapun tujuan menentukan fokus penelitian menurut Moleong:

- a) Penetapan fokus yang membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
- b) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, eskresi untuk menjaring info yang mengalir masuk, data yang diambil cukup menarik dan dipandang relevan. (Moleong, 2000:237).

Jadi fokus yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah membahas tentang “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa, khususnya di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari :
 - a. Kemampuan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat
 - b. Semangat Kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Proses Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, jika ditinjau dari :
 - a. Usulan pembentukan Peraturan Desa
 - b. Perencanaan pembentukan Peraturan Desa
 - c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa
 - d. Perumusan Peraturan Desa
 - e. Pembahasan dan Teknik penyusunan Peraturan Desa
 - f. Pengundangan Peraturan Desa
 - g. Pengesahan Peraturan Desa
 - h. Penyebarluasan Peraturan Desa
3. Peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa Selorejo, jika ditinjau dari:
 - a. Jenis peraturan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

- b. Target dan realisasi peraturan desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang
 - c. Manfaat peraturan desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang
4. Faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa
- a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Pengertian lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti. Berdasarkan lokasi penelitian ini diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dengan demikian lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Malang.

Sedangkan kasus di dalam suatu penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Dengan demikian kasus penelitian ini adalah Kantor Badan Permusyawaratan Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan pertimbangan bahwa:

1. Adanya sikap tidak peduli dari masyarakat Desa Selorejo terhadap proses pembentukan Peraturan Desa, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat desa yang mayoritas masih rendah, lebih mementingkan urusan

pribadi menyebabkan mereka kurang begitu antusias akan pentingnya aspirasi dan peran serta mereka dalam proses pembentukan Peraturan Desa, sehingga beban untuk mengakomodir semua

kepentingan masyarakat desa di serahkan sepenuhnya kepada BPD dan Kepala Desa.

2. Kurang maksimalnya penerapan Peraturan Desa yang telah di bentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada periode-periode sebelumnya.
3. Masih dominannya pengaruh Kepala Desa di dalam proses Penyusunan Peraturan Desa.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari informan maupun dari suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan data sekunder merupakan hasil penggunaan sumber-sumber lain, atau tidak langsung dan merupakan dokumen historis yang murni, ditinjau dari kebutuhan penelitian.

Sedangkan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu orang-orang, peristiwa-peristiwa dan dokumen-dokumen yang dianggap penting. Beberapa sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam hal ini dapat berupa hasil dari wawancara(interview) dengan informan dan pengamatan

(observasi) secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ini meliputi wawancara dengan aparat dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri dalam pengumpulan data dalam penelitian tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Alasan penggunaan data sekunder tersebut adalah karena data-data tersebut merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dan juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data/informasi. Dalam kegiatan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang dilihat dari sumber data dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan mengamati keadaan dari lokasi penelitian dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara Adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab. wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan dari individu atau responden. Dalam teknik wawancara ini, penulis menghubungi para responden yang mengetahui tentang kondisi pada waktu tersebut dan dapat memberikan informasi secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, serta mempelajari data dari sejumlah arsip atas dokumentasi resmi yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, gambar, dan lain-lain. Bentuk rekaman biasanya dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumentasi ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang diperkirakan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang berupa hasil Laporan penelitian, brosur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, sebagai instrument utama dimana peneliti selalu menangkap setiap fenomena yang terjadi terkait dengan obyek penelitian.
2. Pedoman wawancara (interview guide), digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara.
3. Field Notes, yaitu catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan kejadian tertentu.

G. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, maka peneliti menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud adalah bahwa peneliti dalam menemukan kenyataan-kenyataan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara sistematis tentang fenomena yang dihadapi dalam menggunakan kata-kata, kalimat untuk memperoleh kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan. Menurut Moleong (2000:103) analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan kegiatan analisa dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti.

Selanjutnya dalam menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang dilakukan, catatan, maupun laporan dokumen yang ada. Ada tiga prosedur dalam melaksanakan analisa data menurut pendapat Miles dan Huberman

(2007:20), langkah-langkah analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting, untuk mencari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data peneliti juga dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli untuk menambah wawasan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kemudian untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran serta keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data akan berupa table, gambar, hasil wawancara dan data-data dokumen yang mendukung penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan verifikasi data penelitian yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang akan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecerdasannya, yaitu merupakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Desa Selorejo

Secara geografis Desa Selorejo terletak pada posisi 1110 20'13" sampai dengan 1110 40'47" bujur timur dan antar 7018'35" sampai dengan 70 47" lintang selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah sekitar 822 m di atas permukaan air laut.

Untuk lebih memperjelas gambaran tentang Desa Selorejo, berikut ini adalah peta Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang:

Gambar 1. Peta Desa Selorejo



(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2014, selama 2014 curah hujan di Desa Selorejo rata-rata mencapai 65 mm. Temperatur udara di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang berada di kisaran 20°C.

2. Sejarah Desa

Desa Selorejo pada awalnya merupakan daerah hutan, diawali oleh tetua yang “babat alas” untuk membuka ladang serta tempat tinggal bagi warga. Sekitar pertengahan abad 18, Mbah H. Turejo dan Mbah Sayang yang memimpin mengawali pembukaan pertama kali di desa selorejo ini. Pada awal permulaan, desa ini bukanlah bernama Selorejo. Akan tetapi bernama Desa “Watugedhe”, yang memiliki arti kurang lebih batu besar.

Dinamakan Watugedhe, karena didaerah ini terdapat 2 buah batu yang berukuran sangat besar yang konon pada awalnya tinggi dan lebarnya jauh dari ukuran batu pada umumnya. Itu yang menjadi alasan bagi Mbah H. Turejo menamakan daerah ini sebagai daerah Watugedhe. Konon juga terdapat kepercayaan bahwa diantara batu itu memiliki kekuatan mistik, dikarenakan beberapa orang menjadi korban ketika berusaha untuk memecah batu tersebut dikarenakan menghalangi jalan dimana posisi batu itu berada.

Dalam perkembangannya, Watugedhe ini berubah menjadi daerah Selorejo dimana memiliki arti Selo merupakan batu (dalam bahasa jawa) dan rejo sendiri itu diambil dari nama pendiri desa itu yakni Mbah H. Turejo.

3. Misi Desa Selorejo

- 1) Misi peningkatan pembangunan bidang pemerintahan dan administrasi desa, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat dan professional.

- 2) Misi meningkatkan pembangunan bidang fisik untuk kenyamanan dan kelayakan hidup masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana jalan desa, bangun/ rehab gedung sekolah, bangun/ rehab masjid dan mushola serta balai kesehatan, lapangan olah raga, balai desa, balai dusun, irigasi dan sarana ekonomi.
- 3) Misi meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya untuk mendorong kemandirian hidup masyarakat desa. Menunjukkan masyarakat yang bermoral tinggi dengan berjiwa kehidupan keagamaan yang harmonis. Memberikan atmosfir pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan ketertiban dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun pemerintah yang sehat, bersih dan berwibawa, transparan dengan menerapkan manajemen kesejawatan, akreditasi dan evaluasi diri.

4. Visi Desa Selorejo

- 1) Mempermudah aktifitas masyarakat Desa Selorejo
- 2) Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Desa Selorejo untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dalam sosial, keagamaan dan kesehatan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Selorejo.

5. Batas Wilayah

Desa Selorejo adalah bagian dari wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan ketinggian 800 – 1200 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 333,726 Ha . Desa Selorejo adalah dataran tinggi yang secara administratif berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat : Hutan
- b. Sebelah selatan : Desa Petungsewu
- c. Sebelah utara : Desa Gading kulon
- d. Sebelah timur : Desa Tegalweru

Secara administratif, Desa Selorejo terletak di wilayah kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gading Kulon, di sebelah barat berbatasan dengan hutan, disisi selatan berbatasan dengan dengan Desa Petungsewu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Tegalweru.

Desa Selorejo jika diukur jarak dari pusat pemerintahan desa (orbitasi) serta waktu tempuh adalah sebagai berikut :

- Jarak ke ibukota Kecamatan : 4 km
- Jarak ke ibukota Kabupaten : 9 km
- Jarak ke ibukota Provinsi : 51 km
- Waktu tempuh ke ibukota kecamatan : 5 menit
- Waktu tempuh ke ibukota Kabupaten : 30 menit
- Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat
(Ekonomi, kesehatan, dan lain-lain) : 10 menit

Dari jarak dan waktu tempuh yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang berada di daerah yang strategis jika dilihat dari jarak dengan ibukota Kabupaten maupun ibukota provinsi, hal ini dikarenakan Kabupaten Malang berdekatan jaraknya dengan ibukota Provinsi Jawa timur yaitu Surabaya.

Sedangkan jika dilihat dari penggunaan tanah di Desa Selorejo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagian besar dari areal perkebunan jeruk yang subur karena mendapatkan saluran air yang memadai yang terdapat di ladang para petani. Secara terperinci pemakaian tanah di desa Selorejo sebagai berikut :

Tabel 1. Penggunaan Tanah Desa Selorejo Tahun 2014

No	Penggunaan Tanah	Jumlah
1	Sawah	32,000
2	Perkebunan Jeruk	122,080
3	Tempat Ibadah	12
4	Pemukiman	10,080
5	Jalan	12,5
6	Makam	1,700
7	Perkantoran atau Industri	14
8	Lain-lain	7,250
Jumlah		181,160

(Sumber: Monografi Desa Selorejo, 29 Desember 2014)

Berdasarkan tabel 1, penggunaan tanah di Desa Selorejo lebih didominasi untuk areal perkebunan jeruk yang menempati urutan pertama seluas 122,080 Ha, urutan kedua pemukiman seluas 32,000 Ha, urutan ketiga pekarangan seluas 10,080 Ha, lantas untuk bangunan (perkantoran dan industri) dan lain-lain, sedangkan sisanya diperuntukan tempat pemakaman, jalan, dan tempat ibadah.

Pengerjaan sawah di Desa Selorejo menggunakan sistem tadah hujan, air sungai serta air tanah dimana sawah dapat dikerjakan apabila saluran irigasi berjalan lancar. Pengerjaannya cenderung mudah karena selama ini saluran irigasi,

air sungai maupun dari tadah hujan tidak mengalami kendala yang berarti. Tanah sebagai tempat pemukiman atau rumah telah menggunakan bangunan secara permanen yang didominasi terbuat dari bahan batu bata.

6. Keadaan Demografi

Keadaan demografi yaitu mengenai perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, adapun perbandingan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

No	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	1.745	2.478	2.554	5.032	—

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Berdasarkan data yang di dapat pada Desa Selorejo jumlah penduduk sebanyak 5.032 jiwa dan 1.745 KK. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.478 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.554 jiwa. Data tersebut menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

Untuk dapat mendiskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Selorejo, maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk kedalam beberapa klasifikasi usia yang dapat dijabarkan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penduduk Desa Selorejo Menurut Usia Tahun 2014

No.	Usia	Jumlah (orang)
1.	0-12 bulan	35
2.	1-5 tahun	102
3.	6-10 tahun	224
4.	11-15 tahun	345
5.	16-20 tahun	645
6.	21-30 tahun	1132
7.	31-40 tahun	1031
8.	41-50 tahun	792
9.	51-58 tahun	617
10.	>59 tahun	109
	Jumlah	5.032

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Berdasar dari data di atas dapat digambarkan bahwa usia produktif penduduk terdapat pada usia 21-30 tahun di Desa Selorejo sekitar 1.132. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif atau SDM (Sumber Daya Manusia).

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada hakekatnya akan mendorong tumbuhnya keterampilan dan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Secara otomatis akan

membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tabel berikut ini menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata warga Desa Selorejo pada Tahun 2014.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Selorejo Tahun 2014

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta huruf usia 10 Tahun ke atas	413
2	Tidak tamat SD	575
3	Tamat SD	1.187
4	Tamat SMP	1.164
5	Tamat SMA	1.284
6	Tamat PT/ AKADEMI	48
Jumlah		4671

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Selorejo mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar duabelas tahun (SD, SMP dan SMA). Tercukupinya kualitas pendidikan di Desa Selorejo tidak terlepas dari tercukupinya faktor sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentunya masalah ekonomi yang tergolong cukup serta cara pandangan masyarakat yang mulai berkembang.

Sarana prasarana pendidikan di desa Selorejo hanya tersedia pada tingkat pendidikan SD, sementara akses ke pendidikan menengah pertama (SMP) berada

di desa lain yang relatif berdekatan dengan Desa Selorejo dan jangkauannya mudah di tempuh oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, sedangkan untuk akses ke pendidikan menengah atas (SMA) berada di tempat lain yang relatif lebih jauh namun tetap mudah di jangkau oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Mata pencaharian

Pencaharian warga masyarakat desa Selorejo secara umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor antara lain pertanian, pegawai industri, ABRI, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.321 orang, kemudian yang bekerja pada sektor Pegawai/Industri 926 orang, lalu yang bekerja pada sektor ABRI berjumlah 308 orang dan bekerja di sektor lainnya 112 orang.

Banyaknya jumlah penduduk Desa Selorejo yang berprofesi sebagai ABRI dikarenakan di wilayah Desa Selorejo terdapat perumahan yang diperuntukkan untuk keluarga ABRI, dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.240 orang. Berikut ini adalah rincian tabel yang menggambarkan jumlah penduduk berdasar mata pencaharian:

Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Selorejo Tahun 2014

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
		Pemilik Pekerja
1.	Pegawai Desa	10
2.	PNS	28
3.	ABRI	308
4.	Guru	22
5.	Dokter	1
6.	Bidan	12
7.	Manteri Kesehatan/	8
8.	Perawat	103

9.	Lain-lain	112
10.	Pegawai Swasta	166
11.	Pegawai Industri	926
12.	Petani	1321
13.	Buruh Tani	-
14.	Pegawai BUMN/BUMD	31
15.	Pensiunan ABRI	3
16.	Jasa Lembaga Keuangan	37
17.	Jasa Perdagangan	35
	Jasa Angkutan dan	
18	Trasportasi	80
19..	Jasa Keterampilan	37
	Jasa Lainnya	
	Jumlah	3.240

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Agama

Agama merupakan salah satu bidang sosial budaya yang harus dibina, dan dikembangkan dalam menunjang pembangunan disamping bidang-bidang lainnya. Di desa Selorejo pemahaman terhadap tri kerukunan umat beragama yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan tri kerukunan yang dimaksud adalah

- 1) Kerukunan hidup antar umat beragama,
- 2) Kerukunan antar pemerintah dengan umat beragama,
- 3) Kerukunan hidup antar umat beragama itu sendiri.

Di desa Selorejo penduduknya diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Agama Tahun 2014

No	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
1	5.013	19	–	–	–	5.032

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut tingkat kepercayaannya dapat dibagi menjadi dua agama dimana agama Islam mendominasi dengan 5.013 jiwa dan Katolik 19 jiwa.

Kesehatan

Salah satu faktor yang sangat menentukan pelaksanaan pembangunan di desa Selorejo adalah kantor kesehatan, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat pula jiwa yang sehat, yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Masyarakat dituntut aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam menunjang program kesehatan yaitu antara lain gerakan jum'at bersih, pemberantasan sarang nyamuk dan lain-lain. Untuk membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa Selorejo terdapat PUSKESDES (Pusat Kesehatan Desa) dan tempat praktek bidan, yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dengan biaya yang termasuk terjangkau oleh masyarakat di Desa Selorejo pada khususnya dan masyarakat di Kabupaten Malang pada umumnya.

Keluarga Berencana

Dalam upaya meningkatkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di Desa Selorejo, maka pemerintah saat ini terus menggalangkan program keluarga berencana dalam berbagai metode dengan cara atau pendekatan antara lain : *pertama*, memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada seluruh warga, masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana pada usia subur (PUS) yang dilakukan melalui pemutaran fil dll. *Kedua*, mengadakan pendataan serta pelayanan alat kontrasepsi peserta KB aktif bekerja sama dengan para petugas medis dan dibantu oleh kader posyandu yang terlatih.

Fasilitas Umum

Fasilitas yang terdapat di Desa Selorejo cukup lengkap dan relatif mudah diakses oleh masyarakat, baik dalam pendidikan, ibadah, kesehatan, air bersih, listrik, serta sarana dan prasarana perhubungan.

a. Fasilitas air bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih di Desa Selorejo sampai saat ini dapat di penuhi oleh sumber air, yang berupa mata air dan sumur gali dan sebagiannya telah terlayani oleh PDAM. Kebutuhan air bersih perjiwa /perhari berdasarkan standar yang ada adalah 60 liter/jiwa/hari. Meskipun sebagian kebutuhan akan air bersih ini telah dipenuhi oleh PDAM, tetapi mayoritas penduduk masih memanfaatkan air bersih dari sumur.

b. Fasilitas Listrik

Kebutuhan listrik diwilayah Desa Selorejo dipenuhi oleh PLN Cabang Dinoyo. Pelayanan tenaga listrik yang di suplai dari PLN ini telah

digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat desa, dan telah menjangkau keseluruhan pelosok desa.

Kebutuhan tenaga listrik ini dimanfaatkan berbagai keperluan seperti fasilitas penerangan, kebutuhan rumah tangga, fasilitas sosial, perkantoran, dan pemerintahan, industri dan kebutuhan umum. Konsumsi fasilitas tenaga listrik diperkirakan 75% untuk rumah tangga, 15% untuk industri, dan lainnya 10%.

c. Fasilitas Komunikasi

Terdapat beberapa jenis fasilitas komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat desa Selorejo, yaitu: televisi, Radio, Handphone, Telepon, dan Internet. Khususnya telepon dan handphone merupakan salah satu sarana Komunikasi yang diperlukan, untuk memenuhi perkembangan aktifitas pedesaan.

Di Desa Selorejo, hampir seluruh wilayah telah dapat terjangkau layanan jaringan telepon. Namun tidak semua warga memasang jaringan telepon di rumahnya masing-masing.

d. Tempat Ibadah

Di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, tempat ibadah merupakan sarana penting yang di butuhkan oleh masyarakat, masyarakat di Desa Selorejo termasuk masyarakat yang rutin melakukan ibadah secara bersama-sama, hal ini dapat dilihat dengan mudahnya akses tempat ibadah khususnya bagi warga yang memeluk agama Islam dengan terdapatnya 12 tempat ibadah yang terdiri dari musholah maupun masjid yang tersebar di 3 Dusun, sedangkan tempat ibadah yang diperuntukkan

untuk warga yang beragama Katolik berada di desa lain yang jaraknya tidak jauh dari Desa Selorejo.

e. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Wilayah desa Selorejo seluas $\pm 181,160$ Ha telah diperhubungkan dengan jalan baik yang beraspal, maupun jalan setapak, jalan perhubungan ini terdiri dari jalan raya yang telah diaspal dan jalan kampung yang juga diaspal, pada saat ini pemerintah desa sedang memperbaiki jalan yang rusak maupun jalan yang belum diaspal.

Sarana transportasi di Desa Selorejo meliputi Sepeda Motor dan Mobil Pribadi, Dokar, Pic Up, Truk, Dan Ojek sepeda Motor. Sebagian wilayah desa dapat dilewati oleh jalur angkot, dan tukang ojek, tukang ojek ini berasal dari penduduk Selorejo itu sendiri. Jarak yang relative dekat dengan pusat kota menyebabkan tidak ada permasalahan yang berarti dalam perhubungan dan transportasi.

1. Keadaan Pemerintahan Desa Selorejo

Di dalam Pemerintahan Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang terdiri dari beberapa satuan organisasi yakni sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan menjalankan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan daerah serta mempunyai tugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa
- 3) Membina perekonomian desa
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 5) Mendamaikan perselisihan antar masyarakat desa
- 6) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa
- 7) Menjaga norma-norma agama, norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang berkembang di desa

Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
- 2) Penyelenggaraan di bidang pembangunan bersama-sama dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada
- 3) Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat desa
- 4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban
- 5) Pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat yang ada di desa

Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya beserta unsur di bawahnya yaitu antara lain: unsur staff, unsur pelaksana, dan unsur wilayah melakukan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa dengan instansi terkait.

Segala kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam Peraturan Daerah.

Kepala Desa tidak lagi melakukan pertanggungjawaban tugas kepada Badan Permusyawaratan Desa seperti saat BPD masih bernama Badan Perwakilan Desa, tetapi hanya memberikan laporan sebagai pemberitahuan saja. BPD juga tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menolak atau menyetujui laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, tetapi warga masyarakat desa dapat menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana untuk mengkritisi kinerja aparatur pemerintahan desa dan sebagai moderator untuk menyalurkan aspirasinya. Pertanggung jawaban yang dilakukan Kepala Desa langsung kepada Bupati bertujuan agar bisa menghilangkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa yang bisa merusak proses demokrasi di desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban tersebut sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa di Desa Selorejo terdiri atas Sekretaris Desa, beberapa Kepala Urusan sebagai Pelaksana Teknis Lapangan, Kepala Dusun, yang langsung membawahi beberapa RT dan RW. Perangkat Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan juga memberhentikan Perangkat Desanya.

- 1) Sekretaris Desa, Pemerintahan Desa mempunyai tugas di bidang ketatausahaan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa atau yang biasa

disebut Carik yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa membawahi tata usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, administrasi kemasyarakatan, serta umum.

Tugas yang paling menonjol dari seorang Sekretaris Desa adalah urusan surat menyurat, melayani warga desa yang membutuhkan perlengkapan seperti: pengurusan KTP, pengurusan SKCK, pengurusan surat-surat kelahiran atau kematian dan lain.

- 2) Kepala-kepala urusan sebagai Pelaksana Teknis Lapangan, merupakan unsur pelaksanaan lapangan yang mempunyai kedudukan structural sama dengan Sekretaris Desa, sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara teknis di lapangan. Seksi-seksi ini dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh Kepala Desa, sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dengan cepat dilaksanakan. Terdapat beberapa Kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan:

- a) Kepala Urusan Pemerintahan
- b) Kepala Urusan Pembangunan
- c) Kepala Urusan Keuangan
- d) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
- e) Kepala Urusan Umum

c. Pamong Tani

Pamong Tani mempunyai tugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pamong desa memiliki fungsi :

- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petani mengenai pola tanam dan sistem pengairan
- 2) Mengkoordinasikan program-program penghijauan, turus jalan dan hutan rakyat
- 3) Menyelenggarakan kebun bibit desa
- 4) Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sapodi
- 5) Mengatur pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan perikanan
- 6) Mengatur sistem pengairan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana
- 7) Membina dan memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan lumbung desa.

d. Kepala Dusun

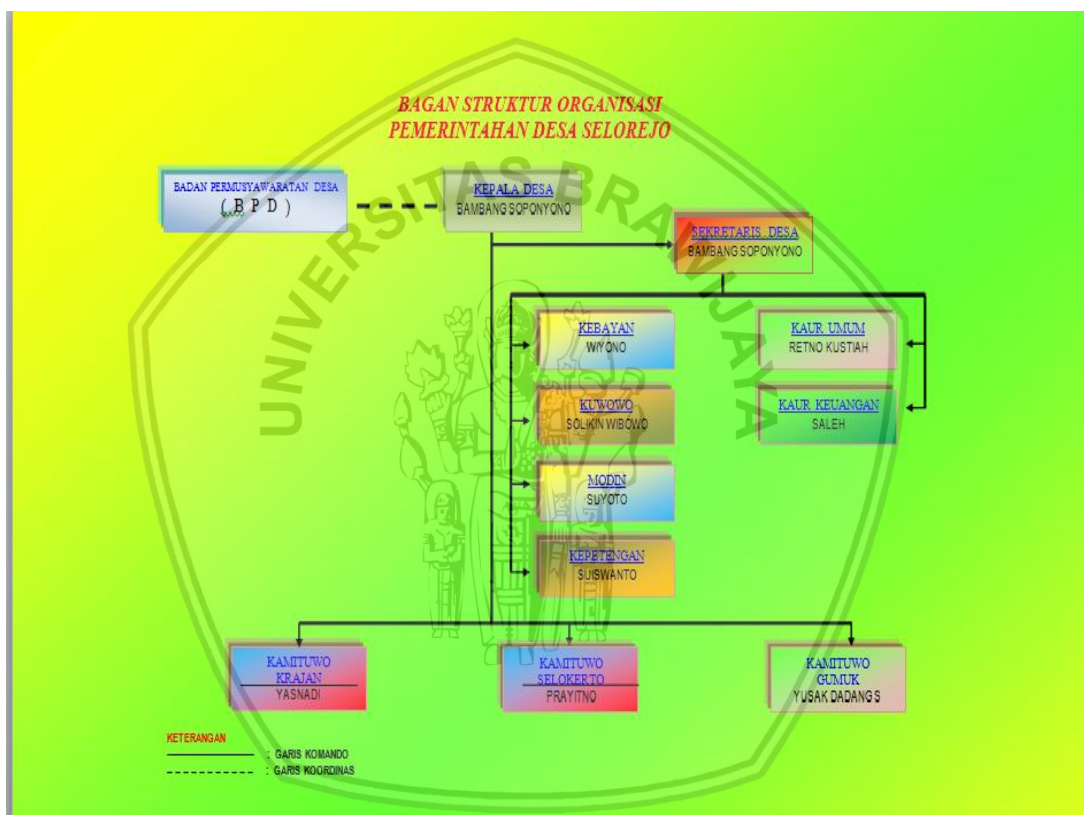
Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bagian wilayah desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Di desa Selorejo wilayahnya dibagi menjadi 3 dusun, yaitu :

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Selokerto
- 3) Dusun Gumuk

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa beserta Unsur di bawahnya selalu melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa dengan instansi terkait.

Berikut ini adalah gambaran struktur Pemerintahan Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang :

Gambar 2.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Selorejo



(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Tabel 7. Nama Aparat Desa Selorejo

NAMA DUSUN	RUKUN WARGA		RUKUN TETANGGA	
	R W		R T	
	NAMA KETUA	RW	NAMA KETUA	RT
1. KRAJAN	SUWADI	RW 01	SUKAMTO	RT 01
	HARTONO	RW 02	PORWOTO	RT 02
	SUWIJI	RW 03	NGADIONO	RT 03

	NGATEMUN	RW 04	EDI KUSNO	RT 04
			SAMSI	RT 05
			RIANTO	RT 06
			SUGIANTO	RT 07
			HARTONO	RT 08
			H E R I	RT 09
			PORNOMO	RT 10
			SUWARSO	RT 11
			JOKO SUSILO	RT 12
2. SELOKERTO	HARI UTOMO	RW 05	WARI	RT 13
	SURAJI	RW 06	NURSAN	RT 14
			DA'I	RT 15
			DANU	RT 16
			HARIONO	RT 17
			NGATUWI	RT 18
			NGATEMUN	RT 19
3. GUMUK	-		WAHID	RT 20

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

Gambar 3. Kondisi Balai Desa Selorejo



(Sumber: Pengamatan di Lapangan)

2. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Gambaran umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selorejo adalah sebagai berikut : BPD di Desa Selorejo secara resmi dilantik pada tanggal 10 Juli 2010 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dalam menentukan jumlah anggota BPD terlebih dahulu harus diadakan penyesuaian dengan cara ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan rincian :

- 1) ≤ 1500 jiwa, 5 orang anggota
- 2) 1501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota
- 3) 2501 sampai 3500 jiwa, 9 orang anggota
- 4) ≥ 3500 jiwa, 11 orang anggota

Berdasarkan Peraturan di atas mengacu pada Perda Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Selorejo anggota BPD yang dipilih paling tidak 5 (lima) orang. dimana Proses Rekrutmen anggota BPD secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Panitia terdiri dari Ketua RW, Pemuka Agama, Pemuka Adat, tokoh pemuda, golongan profesi dan tokoh perempuan.
- c. Anggota panitia tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota BPD.
- d. Jumlah anggota panitia sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang.
- e. Susunan keanggotaan panitia sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dipilih dari dan oleh anggota panitia.
- f. Panitia musyawarah dan mufakat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melakukan seleksi calon anggota BPD
 - 2) Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
 - 3) Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
 - 4) Mengundang peserta musyawarah.
 - 5) Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah.
 - 6) Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota

BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

- f. Pencalonan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat secara berjenjang.
- g. Musyawarah dan mufakat dimulai dari tingkat RW, tingkat Dusun dan tingkat Desa.
- h. Hasil musyawarah tingkat RW, akan menghasilkan nama-nama calon dari RW yang diusulkan ke tingkat dusun.
- i. Hasil musyawarah tingkat Dusun adalah menetapkan calon anggota BPD dan dua orang calon pengganti antar waktu yang mewakili dusun bersangkutan, selanjutnya diajukan ke panitia untuk dilakukan seleksi calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- j. Apabila penetapan calon anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- k. Penetapan calon anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara.
- l. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara.
- m. Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD pada tingkat Desa, disampaikan oleh panitia musyawarah penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acaranya, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan.

- n. Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan calon anggota BPD terpilih, Bupati menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan anggota BPD.

Masa kerja BPD adalah 6 tahun, dan pemberhentian anggota BPD dapat dilakukan apabila :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Apabila anggota melanggar sumpah atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPD
- 3) Berakhirnya masa jabatan dan dibentuk anggota yang baru
- 4) Melakukan perbuatan yang dinilai melanggar norma yang berlaku.

BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah disediakan pembiayaan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Biaya penganggaran tersebut diajukan oleh BPD dan disusun dalam rencana Anggaran BPD tiap tahun anggaran.

Tabel 8. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo

No	Nama pegawai	Jabatan	Tingkat pendidikan
1	Suwadi	Ketua BPD	SLTA
2	Hartono	Wakil Ketua BPD	SLTA
3	Suwiji	Sekretaris BPD	SLTA
4	Suwoyo	Anggota BPD	SLTA
5	Porwoto	Anggota BPD	SLTA
6	Ngadiono	Anggota BPD	SLTA
7	Edi Kusno	Anggota BPD	SLTA
8	Samsi	Anggota BPD	SLTA

(Sumber: Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya jika dilihat dari :

1. Kinerja BPD dilihat dari kemampuan anggota

a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

Salah satu tugas utama dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar segala keluhan, protes, saran maupun masalah-masalah yang timbul di masyarakat dapat segera dapat di terima oleh anggota BPD untuk segera ditindak lanjuti dan dicari jalan keluarnya. Beberapa contoh persoalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Desa Selorejo yaitu :

- 1) Laporan warga ke ketua BPD, mengenai saluran air yang tidak lancar.
- 2) Jalan umum desa yang belum diaspal.
- 3) Jalan umum desa yang sudah di aspal namun perlu diperbaiki atau perlu di lakukan penambalan.
- 4) Laporan salah satu warga yang mengeluhkan tidak beroperasinya Pusat Kesehatan Desa (PUSKESDES) ketika di butuhkan.

Beberapa contoh laporan warga di atas dilaporkan oleh masyarakat kepada BPD, kemudian BPD melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menindak lanjuti laporan BPD. Dalam hal inilah dapat dilihat kemampuan anggota BPD difungsikan yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Hal tersebut dapat dijelaskan seperti beberapa hasil wawancara penulis yaitu salah satunya dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Selorejo yaitu Bapak Suwadi, seperti di bawah ini :

“..... Dengan berdasarkan fungsinya yaitu untuk menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat desa, BPD dengan senang hati menerima keluhan-keluhan masyarakat tentang permasalahan apa saja yang muncul di desa, dengan kinerja yang maksimal yang selanjutnya segala permasalahan, saran, kritikan maupun keluhan warga akan kami tampung terlebih dahulu dan kemudian kami mengajukan kepada Kepala Desa agar sesegera mungkin ditindak lanjuti laporan dan di carikan penyelesaian dari masalah yang di keluhkan warga tersebut.”
(Wawancara pada Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi).

Dilanjutkan dengan wawancara salah satu warga desa Selorejo dusun Selokerto Bapak Kholik, Seperti di bawah ini:

“..... Menurut apa yang saya lihat secara langsung, Badan Permusyawaratan Desa cukup baik dan tanggap dalam memberikan layanan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Selorejo sebagai contoh mengenai jalan yang belum diaspal ataupun pos keamanan yang tidak terawat sebagian telah diperbaiki namun belum kesemuanya teratasi, hal ini diharapkan segera di selesaikan karena mengganggu aktifitas sehari-hari warga desa”.
(Wawancara pada Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Kholik).

Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk di BPD Desa Selorejo, tugas ini harus dijalankan dengan tujuan, dan maksud untuk mempermudah arus informasi dari setiap permasalahan masyarakat desa kepada pemerintah desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa, jika tugas ini berjalan lancar maka hubungan kemitraan yang di jalankan BPD dengan Kepala Desa akan menemukan tujuannya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa.

Ditutup dengan hasil wawancara dari Bapak Prayitno sebagai warga Desa Selorejo, beliau menuturkan:

“.....Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa telah bekerja cukup baik, hal tersebut berlandaskan bagaimana kepedulian mereka terhadap segala permasalahan yang timbul di desa, namun memang harus ada realisasi penyelesaian yang lebih terhadap permasalahan yang muncul tersebut”
(Wawancara pada tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Prayitno)

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selorejo cukup efektif membantu warga sebagai tempat atau wadah dalam menampung serta menyalurkan aspirasi, saran, kritik, maupun keluhan masyarakat dengan cukup baik hal ini ditandai dengan adanya sikap terbuka dan bijaksana dalam menerima keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan masyarakat desa serta menyalurkannya kepada Kepala Desa untuk segera ditindak lanjuti kepada Kepala Desa.

b. Semangat kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa

Faktor lain yang digunakan untuk mengukur kinerja anggota BPD adalah semangat kerja. Pengertian Semangat kerja diartikan sebagai “suatu kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan secara cepat dan lebih baik menyelesaikan suatu kegiatan” (Alex S. Nitisemito, 1992:160). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah kemauan dari setiap individu ataupun kelompok untuk saling bekerja sama dengan giat, rajin, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Semangat kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat di lihat melalui beberapa hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Selorejo yaitu Bapak Porwoto, seperti di bawah ini :

“..... Menurut penilaian saya tentang semangat kerja anggota BPD, dalam melaksanakan tugasnya mereka selalu bersemangat untuk melaksanakan program pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Semangat bekerja para anggota selalu ada di setiap kegiatan pembangunan desa, karena dalam setiap pekerjaan tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu

orang saja, maka setiap anggota berusaha untuk bekerja sama, saling melengkapi dan bahu-membahu menjalankan semua program desa demi mensejahterakan masyarakat di Desa Selorejo.”
(Wawancara pada Tanggal 17 November 2014 di Kios milik warga setempat)

Wawancara selanjutnya dengan Wakil Ketua BPD yaitu Bapak Hartono,

Sebagaimana pernyataannya seperti di bawah ini :

“..... Dalam menjalankan tugas sebagai wakil ketua BPD dan anggota BPD yang lainnya dengan segenap hati selalu melakukan kerja sama dalam upaya pembuatan peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan tidak lupa saya juga mengikuti apa yang menjadi perintah dan saran-saran dari Bapak ketua BPD.”
(Wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Hartono)

Wawancara dengan Anggota BPD Bapak Edi Kusno , sebagai berikut:

“..... Saya dan para anggota baik di dalam kinerja menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa maupun sebagai sarana untuk menyalurkan dan menampung masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat desa, namun semua keputusan yang diambil tetap berada di tangan Bapak Ketua BPD maupun Bapak Kepala Desa”
(Wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Edi Kusno)

Semangat kerja memang harus selalu dimunculkan didalam setiap kegiatan sehari-hari kehidupan manusia, termasuk kinerja BPD didalam fungsinya sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat desa, serta fungsinya sebagai mitra kerja Kepala Desa didalam penyusunan peraturan desa, jika semangat kerja yang ditunjukkan oleh BPD baik maka hasil yang diperoleh akan baik, berjalan efektif dan efisien juga, hal ini akan menuntungkan semua elemen didalam pemerintahan desa baik itu masyarakat desa, pemerintah desa maupun BPD itu sendiri begitu pula sebaliknya.

Ditutup dengan hasil wawancara Ketua BPD yaitu Bapak Suwadi, sebagaimana pernyataan beliau:

“..... Semua anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya selalu berasal dari hati nurani diri sendiri dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain baik dari dalam pihak BPD itu sendiri maupun pihak dari luar BPD, sehingga anggota memiliki motivasi tersendiri dan memiliki semangat kerja yang bagus, semua anggota BPD cukup terorganisir di dalam melakukan kerja sama dalam upaya pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan saya selaku ketua BPD, dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Desa Selorejo.”
(Wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi).

Jika disimpulkan dari beberapa wawancara tersebut, Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari aspek semangat kerja kurang baik, hal tersebut dapat dilihat dari semangat kerja yang berasal dari diri sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan maupun semangat untuk mau bekerja sama namun semua keputusan dan hasil akhir dari musyawarah yang dilakukan tetap ada di tangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD di sini dirasa kurang memiliki kekuatan untuk menentukan hasil akhir dari musyawarah yang dilakukan.

2. Proses Kinerja BPD dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa

a. Usulan Pembentukan Peraturan Desa

Usulan pembentukan sebuah Peraturan Desa bisa muncul dari pihak Kepala Desa dan juga dari BPD, maupun dari masyarakat melalui rapat BPD. Tetapi ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam penyajian materi Pembentukan Peraturan Desa, yaitu Peraturan yang akan dibuat harus benar-benar membawa perubahan dan dapat diterapkan di masyarakat desa. Hal tersebut diatas sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono, beliau mengatakan :

“..... Ketika membuat Peraturan Desa, usulan pembentukan sebuah Peraturan Desa bisa datang dari Kepala Desa dan juga dari masyarakat melalui BPD atau atas inisiatif BPD itu sendiri. Namun hal yang harus diperhatikan dalam penyajian materi Pembuatan Peraturan Desa tersebut

harus benar-benar membawa keinginan, harapan dan aspirasi dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat Desa dan tak lupa peraturan desa tersebut bisa membawa perubahan di dalam penerapannya nanti.”
(wawancara pada Tanggal 17 Desember 2014 di Balai Desa Selorejo)

Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Suwadi, beliau mengatakan bahwa :

“..... Dalam Pembuatan Peraturan Desa, ide maupun gagasannya bisa diperoleh baik dari Kepala Desa maupun dari BPD sendiri dengan tujuan yang jelas dan mewakili suara warga desa Selorejo untuk lebih bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa Selorejo ketinggian yang lebih dari sekarang.”
(Wawancara Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Usulan pembentukan peraturan desa merupakan faktor dasar didalam proses penyusunan peraturan desa, hal ini bisa berasal dari Kepala Desa yang bertindak sebagai pimpinan Pemerintah Desa, dari masyarakat desa melalui perantara BPD, maupun dari Ketua dan anggota BPD sendiri, yang perlu dicermati didalam proses usulan pembentukan peraturan desa ini adalah peraturan desa harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan bisa membawa dampak perubahan yang dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat desa dalam jangka waktu yang tidak sebentar, hal ini harus diutamakan karena peraturan desa yang dibentuk memang dibuat oleh dan untuk masyarakat desa bukan untuk kepentingan pribadi didalam pemerintah desa.

Dilanjutkan dengan wawancara dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Hartono, beliau mengungkapkan bahwa :

“..... Ketika membuat Peraturan Desa, pihak BPD dan Kepala Desa harus selalu bekerjasama dengan baik dan berkelanjutan untuk menciptakan peraturan desa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjadi pemecahan dari segala permasalahan yang timbul di desa, serta membawa aspirasi masyarakat Desa Selorejo, di sini kepala desa mempunyai pengaruh yang dominan didalam pembuatan peraturan desa tersebut.”
(Wawancara Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Hartono)

Wawancara dengan Masyarakat Desa Selorejo, Bapak Jayadi, beliau mengungkapkan bahwa :

“..... Pembuatan Peraturan Desa itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Desa secara umumnya, hal inilah yang akan menjadi cerminan bagaimana BPD dan Kepala Desa benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di dalam naungannya, selama ini yang saya lihat ketika terjadi rapat antara BPD dengan Kepala Desa, masukan-masukan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di Masyarakat benar-benar di perhatikan dan dijadikan tolak ukur bagaimana peraturan desa yang harus dibuat namun hasil akhir dari Peraturan Desa tersebut masih dominan ditentukan oleh Kepala Desa.”
(Wawancara Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Jayadi)

Diakhiri wawancara dengan Masyarakat Desa Selorejo, Bapak ngatikno beliau menjabarkan bahwa:

“..... Pembuatan Peraturan Desa yang akan disusun oleh Kepala Desa dan BPD harus bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik daripada saat ini, karena dengan apa yang saya lihat tidak ada perubahan yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat desa, Kepala Desa juga masih dominan di dalam penyusunan peraturan desa saat ini sama halnya dengan Kepala Desa pada periode yang lalu”
(Wawancara pada Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Ngatikno)

Dari keseluruhan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa usulan ataupun ide gagasan untuk pembuatan Peraturan Desa bisa berasal dari inisiatif BPD ataupun dari Kepala Desa dan dari masyarakat melalui rapatBPD dengan catatan segala Peraturan Desa yang dibentuk harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Akan tetapi kenyataannya di dalam proses pembuatan Peraturan Desa Selorejo pihak Kepala Desa mempunyai kontribusi dominan didalamnya.

b. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasar data dokumentasi dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dalam persiapan dan perencanaan penyusunan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diadakan rapat koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan pada 2 November

2014 dengan agenda rapat adalah untuk menyusun konsep dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan BPD dan Pemerintah Desa dalam persiapan pembentukan Peraturan Desa, menyusun jadwal sosialisasi, materi, alokasi dana, penggunaan dasar hukum bagi peraturan tersebut, hingga pengesahan dan penyebarluasan. Semua itu dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat tersebut.

Bapak Bambang Soponyono selaku Kepala Desa dalam wawancaranya berikut ini menuturkan pentingnya koordinasi antara BPD dan pihak Pemerintah Desa, yaitu:

“..... Memang dalam kenyataannya pencetus ide penyusunan Peraturan Desa ini adalah pihak Pemerintah Desa ataupun dari pihak BPD, namun koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak BPD tidak boleh ditinggalkan, karena dalam prosesnya nanti perlu adanya kerjasama yang baik antara saya selaku Pimpinan dari Pemerintah Desa dan BPD selaku penyambung suara dari masyarakat desa, dimana dengan jelas BPD sendiri berdasar peraturan yang berlaku adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, sehingga nantinya Saya dan BPD harus bekerjasama dan saling melengkapi di dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Oleh karena itu hubungan antara Kepala Desa dan BPD harus benar-benar baik, diharapkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami nantinya tidak akan ada permasalahan yang muncul.”
(wawancara tanggal 17 November 2014 di Balai Desa Selorejo).

Wawancara dilanjutkan Kepala Desa Bapak Bambang Soponyono menuturkan:

“..... Dalam proses penyusunan Peraturan Desa ini adanya gagasan ataupun ide baik yang datang dari BPD maupun dari Kepala Desa, kami harus selalu saling berkoordinasi, mendukung dan bekerjasama dalam menyusun Peraturan Desa yang akan ditetapkan dengan berlandaskan keinginan, harapan dan tujuan keseluruhannya diperuntukkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Selorejo dan mewakili aspirasi warga masyarakat desa”.
(wawancara tanggal 17 November 2014 di Balai Desa Selorejo)

Dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan desa ini, koordinasi antara pihak Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan pihak BPD menjadi faktor penting, karena BPD merupakan penyambung segala permasalahan yang dicurahkan oleh masyarakat desa dan Kepala Desa merupakan elemen paling

penting didalam pembentukan peraturan desa. Kerukunan dan kebersamaan merupakan salah satu ciri-ciri masyarakat di desa sehingga faktor koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD sebagian besar akan berjalan kondusif.

Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Suwadi, beliau menuturkan:

“..... Kerjasama antara BPD dan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa sangat penting di dalam pembentukan peraturan desa, hal ini dikarenakan BPD yang bertugas sebagai mitra kerja Kepala Desa didalam penyusunan peraturan desa, harus bisa saling membantu dan mendukung di dalam prosesnya nanti, untuk semuanya diperuntukkan untuk kemajuan masyarakat desa nantinya”
(Wawancara pada Tanggal 17 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Bambang Soponyono selaku Kepala Desa dan BPD selaku Ketua BPD, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perencanaan serta penyusunan Peraturan Desa baik pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintah Desa yang di wakili Kepala Desa, ide ataupun gagasan yang diangkat haruslah peraturan yang bertujuan untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakat Desa serta mewakili aspirasi masyarakat didalamnya.

c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa

Di dalam tahap persiapan pembentukan Peraturan Desa, kegiatan yang penting adalah proses sosialisasi, Kepala Desa dan BPD dalam rangka mempersiapkan pembentukan Peraturan Desa adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui forum rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan beberapa wawancara penulis dengan Bapak Bambang Soponyono selaku Kepala Desa Selorejo, Bapak Suwadi

selaku ketua BPD, Bapak Hartono selaku Wakil Ketua BPD, Bapak Suwiji selaku Sekretaris BPD dan tokoh masyarakat, dalam mempersiapkan pembentukan peraturan desa adalah perlu melakukan sosialisasi yang bagus terhadap materi pokok yang akan diatur untuk disampaikan ke dalam forum rapat sosialisasi.

Wawancara dengan Bapak Suwadi, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa :

“..... Rancangan Peraturan Desa harus terlebih dahulu disosialisasikan atau diberitahukan kepada masyarakat desa secara keseluruhan sebelum dibahas lebih jauh, tujuan utamanya adalah untuk mentransparasikan atau memunculkan keterbukaan mengenai materi pokok peraturan yang akan dibuat. Dengan melalui forum atau musyawarah tersebut, warga desa akan mengetahui secara jelas isi dari peraturan yang akan dibuat di desa ini. Masyarakat juga diberi kesempatan lebih untuk memberikan usulan atau gagasan mereka jika isi peraturan tidak sesuai dengan permasalahan yang muncul di desa. Hal tersebut selain untuk mengikut sertakan peran penting masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa, juga untuk membiasakan kepedulian warga desa terhadap proses demokrasi yang dijalankan di desa ini.” (wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi).

Di lanjutkan penjabaran dari Kepala Desa Selorejo, Bapak Bambang Soponyono menuturkan pentingnya sosialisasi adalah:

“..... Sosialisasi atau pemberitahuan harus diberikan kepada masyarakat di desa agar mereka tahu peraturan seperti apa yang akan dibuat, diatur dan disahkan menjadi peraturan di Desanya. Sehingga di waktu mendatang tidak ada penilaian bahwa Pemerintah Desa disini terkesan semaunya sendiri dengan membuat peraturan tanpa penyuluhan terlebih dahulu dengan warganya. Apalagi sosialisasi adalah salah satu prosedur langkah dalam penyusunan Peraturan Desa, jika dilanggar atau tidak dijalankan maka akan dihasilkan Peraturan Desa yang tidak sah atau cacat secara hukum.”
(wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Balai Desa Selorejo)

Sosialisasi didalam persiapan pembentukan peraturan desa merupakan gambaran bagaimana pemerintah desa disini memunculkan aspek keterbukaan kepada masyarakat desanya, karena pemerintah desa disini menjalankan otonomi

desanya sendiri, maka keterbukaan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat diperlukan, sebab peraturan desa antara desa satu dengan desa lainnya itu berbeda-beda sehingga perlu adanya perhatian yang lebih dari warga desa mengenai peraturan desa yang akan diterapkan didesanya.

Wawancara dengan Bapak Hartono selaku wakil Ketua BPD, beliau menjelaskan bahwa:

“..... Proses sosialisasi disini bertujuan agar pembuatan peraturan desa yang dibuat benar-benar sesuai dengan permasalahan yang muncul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi warga desa, dengan tujuan akhir adanya jalan keluar yang tepat dari setiap permasalahan yang muncul dengan diterbitkannya peraturan desa yang dibuat”

(Wawancara pada tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Hartono)

Wawancara dengan Bapak Suwiji, selaku Sekretaris BPD, beliau menuturkan

bahwa:

“..... Sosialisasi disini lebih bersifat untuk mengikutsertakan peran aktif masyarakat desa di dalam penyusunan masyarakat desa agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan yang akan diterapkan didesanya, dengan dilakukannya sosialisasi, keterbukaan pihak pemerintah desa dengan warganya akan berjalan dengan baik”

(Wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Kediaman Bapak Suwiji)

Menurut Bapak Gimán, Selaku Tokoh Agama di masyarakat beliau mengatakan bahwa pentingnya sosialisasi :

“..... Penyuluhan atau yang lebih dikenal dengan sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh warga Desa, Peranan serta kinerja Pemerintah Desa Solorejo saya nilai cukup baik dengan selalu melibatkan peran serta masyarakat tanpa memandang status sosial masyarakat tersebut dalam rangka membiasakan proses demokrasi di desa ini”.

(Wawancara pada Tanggal 18 November 2014 di Masjid Solorejo)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Pembentukan Peraturan Desa hal yang penting adalah pada tahap Sosialisasi, dimana

masyarakat turut serta berperan penting didalamnya, tahap ini bertujuan memberikan informasi yang jelas, transparan dan apa adanya kepada warga masyarakat desa.

Menurut data presensi atau daftar hadir anggota rapat sosialisasi Peraturan Desa terdiri dari Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda dari karang taruna, dan pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan menurut pengamatan penulis, yang hadir dalam rapat tersebut telah memenuhi kuota persyaratan, hampir seluruh elemen hadir dan jumlahnya memenuhi.

Dengan demikian hasil penelitian dilapangan Rancangan Pembentukan Peraturan Desa yang disosialisasikan dalam rapat tersebut adalah RPJMDesa Tahun 2014, Rancangan Peraturan Desa tersebut berasal dari pemikiran Pemerintah Desa Selorejo maupun dari inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri.

d. Perumusan Peraturan Desa

Pemerintah Desa memang sebagai pencetus ide pembuatan peraturan desa, tetapi tidak mutlak dari keinginan pemerintah saja. Mereka juga mendengarkan permasalahan, kritikan, aspirasi dan keinginan dari warga desa sebagai bahan pertimbangan isi dari peraturan yang dibuat. Seperti contoh usulan dari warga desa yang ingin di tetapkan pada Peraturan Desa antara lain :

1. Warga desa meminta saluran air atau gorong-gorong di Dusun Sumber Tempur agar segera diperbaiki dan dimaksimalkan fungsinya agar tidak muncul permasalahan yang sama di kemudian hari.
2. Warga desa Sumber Rejo meminta bantuan Perbaikan Jalan desa yang rusak atau bolong dan sudah lama tidak diperbaiki oleh pemerintah desa

dengan mengharapkan kualitas aspal yang bagus agar jalan yang rusak tersebut tidak kembali rusak hanya dalam jangka waktu yang sebentar.

3. Warga desa mengharapkan bantuan Perawatan yang rutin terhadap makam yang ada di desanya karena selama ini dianggap makam di Dusun Selorejo cenderung kurang terawat.
4. Warga desa Selorejo meminta kepada Pemerintah Desa agar jalan di disunnya yang selama ini belum diaspal agar segera diaspal, hal ini memang belum menjadi perhatian pemerintah desa padahal jalan merupakan aspek penting didalam kelancaran kegiatan sehari-hari warga desa.

Hal diatas sesuai dalam Wawancara dengan beberapa warga Desa Selorejo, salah satunya dengan Bapak Sukandar, beliau mengutarakan bahwa :

“..... Keluhan warga mengenai perbaikan saluran air atau gorong-gorong terkadang buntu tidak menyalurkan air dengan lancar, hal ini menyebabkan terkadang air tergenang di pelataran rumah warga, yang dikhawatirkan akan timbul penyakit yang dapat menghambat kehidupan sehari-hari warga, dimohon oleh pihan Pemerintah Desa segera diperbaiki agar tidak muncul permasalahan yang sama dari waktu ke waktu”.

(Wawancara pada tanggal 19 November 2014 di Kediaman Bapak Sukandar)

Wawancara berikutnya dengan salah satu warga Desa Selorejo Bapak Agung mengutarakan bahwa :

“..... Warga di Dusun Sumber Rejo Mengusulkan agar jalan di Dusun ini sesegera mungkin untuk diperbaiki karena sudah lama sekali jalan ini tidak ada perbaikan sehingga dapat meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan, karena selama ini yang saya lihat banyak warga baik yang berasal dari desa Selorejo maupun yang dari Desa tetangga sering jatuh di jalan ini karena kondisi jalan yang memang sudah rusak, perbaikan jalan juga akan memperlancar mobilitas warga yang hendak melakukan aktifitasnya”.

(Wawancara pada tanggal 19 November 2014 di Kediaman Bapak Agung)

Keluhan-keluhan masyarakat desa yang disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwujudan peran aktif masyarakat desa yang peduli terhadap bagaimana kondisi didesanya, dikarenakan matapencaharian masyarakat desa didominasi oleh bidang pertanian maka permasalahan yang lebih diutamakan mengenai infrastruktur yang ada didesanya, dan mengenai saluran pembuangan, selain itu dikarenakan didalam masyarakat desa kental akan nuansa keagamaan maka faktor ibadah maupun makam merupakan faktor yang diperhatikan disini.

Wawancara berikutnya dengan Bapak Suharto mengutarakan bahwa :

“..... Saya mewakili warga di Dusun Selorejo mengusulkan untuk segera dilakukan proses pengaspalan didusun kami, hal ini sangat mengganggu proses aktifitas warga dusun Selorejo, padahal jalan-jalan desa di dusun lainnya sudah diaspal, kami harapkan perhatian dan realisasi dari permasalahan yang kami hadapai”.

(Wawancara pada tanggal 19 November 2014 di Warung Kopi Bu Tutik)

Ditutup dengan hasil Wawancara dengan Bapak Wawan Warga Dusun Selorejo, beliau menuturkan:

“..... Saya mengusulkan agar dilakukannya perawatan yang rutin terhadap makam yang berada di desa Selorejo ini, hal tersebut dikarenakan banyak tumbuhnya rumput liar di makam, dan kurang terawatnya kebersihan di makam, apalagi akan menjelang bulan Ramadhan maka perlunya perhatian pemerintah desa terhadap perawatan makam”

(Wawancara pada tanggal 19 November 2014 di Kediaman Bapak Wawan)

Disimpulkan dari beberapa usulan warga desa tersebut Pemerintah desa dalam merumuskan suatu peraturan harus lebih memperhatikan usulan dari warga desanya. Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat desa menurut hasil wawancara termasuk banyak dan bermacam jenisnya, diharapkan nantinya Peraturan Desa tersebut dari dan untuk warga desanya sendiri. Dengan melihat isi

dari rumusan peraturan Desa yang dirumuskan, Pemerintah Desa Selorejo telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik karena tidak mengabaikan kepentingan warganya.

e. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Pada tahap Pembahasan peraturan desa dapat dilihat pada Peraturan Desa APBDes tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2014, bertempat di sekretariat BPD Desa Selorejo, dengan peserta rapat yang dihadiri oleh :

1. Ketua BPD, Wakil Ketua dan semua anggota BPD lainnya.
2. Pemerintah Desa berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 3 Kepala Urusan.
3. Perangkat Daerah berjumlah 3 (tiga) orang.

Pada tahap pembahasan ini, Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono menyampaikan penjelasan mengenai pokok-pokok materi Peraturan Desa APBDes 2013 yang telah dirumuskan bersama anggotanya mengenai pengelolaan serta pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan dokumentasi rapat, pihak-pihak yang memberikan masukan antara lain :

1. Ketua BPD Bapak Suwadi mengusulkan agar dana operasional yang di peroleh Pemerintah Desa Selorejo dialokasikan secara tepat sasaran, proporsional, seimbang dan sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Kepala Urusan Pembangunan Pemerintah Desa Bapak Imam Wahyudi mengusulkan agar setelah ditetapkan Peraturan Desa APBDes 2013 segera dibentuk tim pelaksana anggaran tahun 2014 agar program pembangunan dan kesejahteraan yang direncanakan segera bisa dilakukan.

3. Sekretaris Kecamatan Dau Bapak Bagus Setiawan memberikan saran dan pertimbangan agar dalam pengalokasian dan penggunaan dana yang dituangkan dalam Peraturan Desa APBDes 2013 benar-benar berdasarkan masalah yang ada di desa dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa dengan melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam pemerintahan desa Selorejo sehingga tidak perlu lagi ada revisi tentang isi dari peraturan desa tersebut.

Dari rapat pembahasan tersebut tercapai kesepakatan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa APBDes 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui penggunaan DPD/K tahun 2014 dituangkan dalam Peraturan Desa APBDes tahun 2014 yang sesuai dengan anggaran.
2. Menyetujui pengadaan kegiatan ruwah deso dalam rangka menyambung tali silaturahmi antar sesama warga desa, untuk menjaga kebersihan desa dan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2013.
3. Dana swadaya masyarakat yang diberikan setelah Peraturan Desa ditetapkan, dituangkan dalam Peraturan Desa Perubahan APBDes tahun 2014.
4. Membentuk Tim Pelaksana Proyek atau Kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam hubungannya dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang APBDes, Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono juga menerbitkan 1 (Satu) Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Kegiatan,

Pelaksana dan Pemegang Kas Keuangan Proyek kegiatan pembangunan desa tahun anggaran 2013. Hal tersebut sesuai dengan usulan dari Ketua Bidang Pembangunan yaitu Bapak Imam Wahyudi dalam rapat pembahasan:

“..... Ketika APBDes tahun 2014 telah ditetapkan namun belum ada tim pelaksana proyek, tentu hal ini bisa menghambat laju pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan kesejahteraan desa yang telah ditetapkan. Memang menurut pemikiran saya seharusnya sesegera mungkin tim ini harus segera dibentuk, karena dengan segera dibentuk segala proyek atau program desa dalam memajukan atau mensejahterakan masyarakat desa di dalamnya, akan bergerak dengan sigap, cepat dan tepat sasaran segala sesuatu yang di canangkannya, sehingga segala sesuatunya selesai tepat waktu dengan target yang telah ditentukan”

(wawancara pada Tanggal 20 November 2014 pukul 20:30 di Kediaman Bapak Imam Wahyudi)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses pembahasan dan teknik penyusunan Peraturan Desa menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Draf rancangan Peraturan Desa yang dibentuk atas usulan Pemerintah Desa Selorejo.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan kepada masyarakat desa dalam forum rapat sosialisasi atau musyawarah diadakan perumusan kembali oleh pemerintah desa sebelum dibahas dalam forum rapat BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dikirim kepada BPD melalui sekretaris BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau 3 x 24 jam sebelum diadakan pembahasan dalam forum rapat BPD.

Dalam forum rapat bersama BPD tersebut Kepala Desa memberikan penjelasan secara detail perihal materi inti Peraturan Desa yang akan dibentuk. BPD setidaknya harus memberi tanggapan paling

lambat 30 hari dari tanggal diserahkannya rumusan oleh Kepala Desa, apabila dalam jangka waktu tersebut pihak BPD tidak memberikan tanggapan, maka Kepala Desa dapat mengeluarkan keputusan yang berdasarkan berita acara dan risalah resmi rapat desa untuk dapat mengesahkan dan menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tanpa persetujuan BPD.

2. Draf rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD

Draf rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD juga harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat desa sebelum dirapatkan lebih lanjut melalui forum rapat. Kemudian BPD mengambil langkah untuk mengundang Pemerintah Desa untuk bersama-sama mengadakan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang telah mereka buat untuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Desa.

Minimnya kendala dalam proses pelaksanaan perumusan peraturan desa hingga pembahasan Peraturan Desa tidak terlepas dari baiknya komunikasi, hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD maupun dengan masyarakat desa, sehingga tidak ada masalah yang berarti, diantaranya berdasarkan faktor:

1. Kesamaan visi dan misi yakni selalu bertujuan menginginkan kemajuan di desa, mensejahterakan masyarakat desa, dan menjadikan desa Selorejo ke arah yang lebih baik hal ini terbukti dengan dalam setiap pembahasan rancangan peraturan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Pemerintah Desa dan BPD sadar diri bahwa posisi masing-masing sebagai unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat dan BPD menyadari posisinya sebagai moderator aspirasi, keinginan, dan penyambung dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat desa.

3. Koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam berinteraksi dengan masyarakat desa sangat baik, sehingga masing-masing elemen dapat berjalan bersama untuk kepentingan bersama dengan tujuan akhir memajukan desa.
4. Koordinasi yang berjalan baik antara sesama anggota BPD, hal tersebut tampak dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat tanpa voting yang dapat memakan waktu dan biaya lebih.
5. Pihak Pemerintah Desa maupun BPD selalu aktif, terbuka dan berkelanjutan dalam memantau perkembangan masyarakat desa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini yang membuat Pemerintah Desa dengan mudah dan transparan selalu mendapat informasi dan masukan yang berkembang di masyarakat secara langsung.
6. Cukup bagus proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dengan BPD kepada masyarakat desa dalam prosedur penyusunan peraturan desa, hal ini menjadikan peraturan desa yang dibahas dan akan ditetapkan di desa Selorejo telah membawa keinginan dan tidak melenceng dengan tujuan bersama yang telah dicanangkan.

f. Pengesahan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan setelah rancangan Peraturan Desa dibahas dalam forum rapat BPD bersama pemerintah Desa, maka rancangan

Peraturan Desa dibawa ke dalam forum rapat paripurna BPD untuk mendapatkan pengesahan. Rapat paripurna BPD dilaksanakan pada tanggal 2 November 2014, bertujuan untuk mengesahkan Peraturan Desa APBDes Tahun 2014 yang dihadiri oleh:

1. BPD, berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 ketua, 1 Wakil ketua, 1 sekretaris, dan 5 anggota.
2. Pemerintah Desa yang berjumlah 9 orang terdiri dari Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Urusan, dan 4 Pelaksana Teknis.
3. Perangkat Daerah 3 orang yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi PMD, dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Dalam rapat Paripurna yang dilakukan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, tanpa melakukan voting, semua keputusan dapat diterima oleh peserta rapat, hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Suwadi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

“..... Dalam rapat Paripurna yang dilakukan, semua yang hadir menyetujui apa yang telah dianggarkan dalam rancangan APBDes tahun 2014 yang diusulkan oleh Pemerintah Desa karena dana yang diterima dan di alokasikan dari anggaran yang ada oleh Pemerintah Desa dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada penolakan dari peserta rapat, hanya saran atau berupa masukan saja yang menjadi tambahan di rapat paripurna tersebut.”

(wawancara pada Tanggal 20 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Anggota BPD lain, Bapak Sahudin menyatakan bahwa:

“..... Rancangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa Selorejo tidak ada masalah, saya dan anggota BPD lainnya bukan tidak peduli dan hanya mengikuti rancangan yang di ajukan oleh Pemerintah Desa, namun memang anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Desa adalah benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, sehingga kami sebagai anggota BPD tidak akan mempersulitnya, sebagaimana telah disepakati bersama bahwa peraturan desa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat

desa, jika memang sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan yang ada maka kami sepakat menyetujuinya.”
(wawancara pada tanggal 20 November 2014 di Kediaman Bapak Sahudin)

Keputusan rapat tersebut dengan hasil kesepakatan menyetujui pengesahan rancangan Peraturan Desa APBDes Tahun 2014 dan disahkan menjadi Peraturan Desa pada tanggal 2 November 2014.

Berdasarkan hasil dokumentasi, bahwa isi Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2014 Desa Selorejo adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah segala pendapatan yang diperoleh dari desa, baik pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi 2 (dua) yang terdiri atas:
 - a) Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah desa yang terdiri atas : swadaya, partisipasi masyarakat, gotong-royong, dan kekayaan desa.
 - b) Sumbangan dari pemerintah yang terdiri dari sumbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten yang meliputi bagian dari pajak dan retribusi, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima melalui Pemerintah Kabupaten.
2. Belanja adalah segala pengeluaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Pos pembelanjaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Belanja rutin meliputi belanja aparatur pemerintah desa, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, belanja lain-lain, dan belanja tak terduga.
- b) Belanja Pembangunan meliputi pembangunan jalan antar Desa di dusun Sumber Rejo, biaya untuk Musbangdes, dan lain-lain. Pos belanja yang dipaparkan adalah berdasar Peraturan Desa Selorejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013.

g. Pengundangan Peraturan Desa

Setelah Peraturan Desa telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa bersama BPD, maka langkah selanjutnya Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa (Carik) untuk mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh pejabat yang berwenang mempunyai maksud dan tujuan agar diketahui dan dimengerti oleh masyarakat desa dan mempunyai kekuatan hukum secara sah sebagaimana diungkapkan Bapak Bambang Soponyono, sebagai Kepala Desa:

“..... Peraturan Desa yang telah dibentuk dan sudah disetujui secara bersama oleh pemerintah desa bersama BPD harus langsung diundangkan dan dicatat oleh yang berwenang dalam hal ini yang bertugas adalah sekretaris desa dan juga harus diregistrasikan, tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum dari Peraturan Desa yang telah dibuat agar diketahui dan dimengerti oleh warga desa Selorejo. Jika tidak dilakukan maka peraturan tersebut tidak akan bisa diterapkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.”

(wawancara pada Tanggal 21 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Suwadi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjabarkan sebagai berikut :

“..... Di dalam proses Pengundangan Peraturan Desa yang telah disusun dan disahkan secara bersama antara pihak BPD dengan Kepala Desa kemudian dicatat oleh sekretaris desa dan harus segera diregistrasikan, hal tersebut bertujuan guna mendapatkan kekuatan hukum dari Peraturan Desa yang telah dibentuk agar dimengerti oleh warga desa secara umumnya”.
(wawancara pada Tanggal 21 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah Peraturan Desa dibentuk dan disahkan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, harus disetujui oleh para peserta rapat setelah itu dilakukan pencatatan oleh Sekretaris Desa atau Carik dan diregistrasikan dengan tujuan untuk mendapat kekuatan hukum secara sah dari Peraturan yang telah dibuat serta Peraturan desa tersebut dimengerti dan diketahui oleh Warga Desa.

h. Penyebarluasan Peraturan Desa

Dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan dapat diketahui setelah Peraturan Desa sudah mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa yang didahului dengan disahkannya keputusan dari BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa, maka proses selanjutnya yang dilakukan yaitu penyebarluasan. Proses penyebarluasan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Selorejo relatif sama dengan Pemerintah Desa lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat melalui forum-forum rapat yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Khusus untuk Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2014 rapat diadakan pada tanggal 3 November 2014 di Balai Desa Selorejo.
2. Pada tahap sosialisasi tersebut Pemerintah Desa menyalin Peraturan Desa secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan dibagikan kepada para tokoh

masyarakat, pemuka agama dan kepada para pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Selorejo.

3. Melaporkan penetapan Peraturan Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, agar Peraturan Desa tersebut diumumkan dalam berita daerah. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan dalam pasal 49 ayat (3) sebagai berikut, “Pengundangan Peraturan Daerah dan Lembaga Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.”

Dengan melihat proses penyebarluasan kepada masyarakat tersebut menurut Bapak Supi'i selaku tokoh masyarakat Desa Selorejo mengungkapkan:

“..... Proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selorejo dalam mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah dibuat dan disahkan secara bersama dengan BPD kepada masyarakat desa sudah cukup baik, masyarakat disini diundang secara terbuka untuk datang dan pihak Pemerintah Desa dengan jelas dan terperinci menjelaskan tentang hasil dari Peraturan Desa yang telah dibuatnya.”

(Wawancara pada Tanggal 21 November 2014 di Kediaman Bapak supi'i)

Sosialisasi mengenai peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Pemerintah Desa harus dilakukan, hal ini merupakan cerminan dari seberapa terbukanya pemerintah desa bersama BPD didalam mentransparasikan peraturan yang telah dihasilkan, sehingga masyarakat desa mengetahui apakah peraturan desa yang sudah ditetapkan disini sudah sesuai dan membawa masukan-masukan dari permasalahan yang mereka hadapi, dan menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapinya.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Subagyo selaku Tokoh Agama di Desa Selorejo menuturkan bahwa:

“..... Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dirasa cukup baik, sudah mewakili keinginan masyarakat selama ini dan

terarah, dapat dicontohkan disini yaitu mengenai pembangunan secara keseluruhan di 3 Dusun di dalam Desa Selorejo, pembenahan jalan rusak yang sudah lama tidak di perbaiki, dan menata ulang saluran air agar lancar baik ke sungai maupun yang di alirkan ke sawah, menyangkut soal besarnya dana swadaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kemampuan warganya, penyaluran dana harus jelas. Apalagi dalam prosesnya warga masyarakat dilibatkan dalam tahap sosialisasi, dimana warga diminta untuk memberikan saran, kritikan, dan aspirasi mengenai isi dari materi Peraturan Desa tersebut. Intinya yang diharapkan warga desa itu sebenarnya sederhana, yaitu keterbukaan mengenai pembangunan khususnya pengalokasian dana yang dikeluarkan, Pemerintah Desa dan BPD sudah baik dalam menjalankan tugas terutama sebagai pembawa suara masyarakat, disini warga sejak dulu percaya dengan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa maupun BPD, tinggal bagaimana kenyataan di lapangan apakah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan atau belum sesuai dengan yang diharapkan.”

(wawancara pada tanggal 21 November 2014 di Kediaman Bapak Subagyo)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyebarluasan Peraturan Desa Selorejo yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta BPD sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan mengundang warga dari berbagai kalangan menunjukkan Pemerintah Desa Selorejo bersikap transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui Peraturan Desa yang telah dibuat.

3. Output dan Outcome peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa, jika ditinjau dari:

Beberapa jenis peraturan desa yang di hasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa di Desa Selorejo:

Tabel 9. Jenis-Jenis Peraturan Yang Dihasilkan Desa Selorejo

No	Jenis Peraturan	Tahun Pembuatan Peraturan	Keterangan
1	Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang	2013	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan desa Nomor 2 tentang APBDes tahun 2014 untuk legalitas

			<p>penggunaan keuangan kas dalam melaksanakan kegiatan desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Desa Nomor 2 tentang pemasukan dan pembiayaan yang dikeluarkan selama 1 tahun • Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja • Peraturan Desa tentang pengadaan acara Ruwah Deso
2	Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang	2012	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan desa Nomor 1 tentang RPJMDes Tahun 2014 untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa • Peraturan Desa Nomor 1 tentang APBDes Tahun 2014 tentang legalitas keuangan kas desa dalam melaksanakan kegiatan desa
3	Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Desa terdahulu	2011	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Desa Nomor 5 tentang APBDes tahun 2011 untuk legalitas penggunaan keuangan kas dalam

			<p>melaksanakan kegiatan desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Desa Nomor 5 tentang Retribusi
--	--	--	---

(Sumber Monografi Desa Selorejo Tahun 2014)

a. Output jenis peraturan desa di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Ada beberapa jenis peraturan desa yang telah dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah Desa Selorejo dalam hal ini Kepala Desa bersama BPD, peraturan tersebut dapat dibagi kedalam 2 jenis peraturan, antara lain:

a) Peraturan Desa yang dibentuk karena perintah Perundang-undangan

Peraturan desa jenis ini bersifat wajib untuk dibuat, karena Peraturan Desa jenis ini nantinya akan menjadi sumber hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Diantaranya yaitu Peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta APBDes. Berdasarkan penjelasan dan telah diperinci di atas dan berdasarkan hasil penelitian serta data dokumentasi di lapangan, BPD Desa Selorejo telah mengesahkan APBDes tahun anggaran 2013 pada tanggal 2 November 2014, APBDes tersebut adalah sebagai sarana untuk legalitas penggunaan dan penerimaan keuangan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Pada tanggal 2 November 2014 pemerintah desa juga telah mengesahkan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan disahkan oleh BPD bersama Kepala Desa, Peraturan Desa

ini lebih mengatur tentang Tata Kerja, Fungsi Perangkat Desa serta kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Peraturan Desa mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan bersifat mutlak untuk dibuat, karena dalam Peraturan Desa ini mengatur tentang tata kerja, fungsi dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Soponyono, selaku

Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa:

“..... Untuk tahun 2014 ini, jenis peraturan desa yang dibuat sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai APBDes dan susunan organisasi pemerintahan desa, dua jenis peraturan desa ini yaitu bersifat mutlak atau diharuskan untuk dibuat, peraturan tentang APBDes selalu dibuat tiap tahunnya karena bertujuan untuk mengukur berapa banyak pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, karena disetiap tahunnya selalu mengalami perbedaan baik itu pendapatan maupun pengeluaran yang diperlukan, pada setiap awal tahun peraturan desa ini harus segera dirumuskan karena kalau tidak segera dilaksanakan maka kami sebagai pihak pemerintah desa akan sulit untuk mengatur dan menjalankan keuangan dari pemerintah desa, karena belum ada peraturan yang menjadikan dasar untuk kami mengambil langkah”

(Wawancara pada tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Suwadi, Selaku Ketua

BPD Desa Selorejo, beliau menyampaikan:

“..... Jenis peraturan yang berdasarkan karena perintah perundang-undangan memang bersifat harus dibuat, seperti peraturan desa tentang APBDes dan susunan dan tata kerja pemerintahan desa, jika peraturan tersebut tidak segera dibuat maka akan sangat mengganggu kinerja pemerintah desa terutama di dalam pengalokasian dana yang masuk dan yang dikeluarkan untuk menjalankan rumah tangga desa, selain itu juga akan mengganggu program-program kesejahteraan desa yang sudah ditargetkan.”

(Wawancara pada tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

b) Peraturan desa yang dibentuk karena perintah peraturan desa terdahulu

Peraturan Desa yang dibentuk karena perintah Peraturan Desa terdahulu yaitu mengenai pungutan retribusi jalan yang tetap menggunakan Peraturan Desa yang lama. Restribusi untuk Truk atau kendaraan berat yang melintas di jalan desa dusun Sumber Rejo. Peraturan Desa ini masih menggunakan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 yang juga mengatur hal yang sama. Dalam penyusunannya harus memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang APBDes, dimana di dalam peraturan desa tersebut telah diatur tentang Retribusi yang memuat pendapatan desa dalam hal Retribusi di desa Selorejo. Di dalam peraturan desa tersebut juga sudah mengatur tentang pembagian keuntungan antara desa dan seluruh RT yang dilewati truk-truk tersebut.

Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono, menjelaskan bahwa:

“..... Mengenai pajak retribusi jalan, peraturannya masih mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pada tahun 2010, retribusi yang dibebankan disini bertujuan untuk menjaga perawatan dan kualitas jalan yang di lewati truk atau kendaraan berat yang melaluinya, Isi dan materi yang ada didalamnya tidak boleh melenceng dari peraturan yang sudah mengaturnya”
(Wawancara pada tanggal 22 November 2014 di Kediaman bapak Bambang Soponyono)

Peraturan Desa jenis ini adalah Peraturan Desa yang terikat dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam membuat peraturan harus melihat peraturan desa terdahulu yang telah mengatur tentang isi peraturan yang akan dibuat tersebut. Karena sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bahwa sebuah peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang terdahulu.

b. Outcome Peraturan desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Produk Peraturan Desa yang sudah dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa dapat memiliki 7 (tujuh) fungsi antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Desa berfungsi sebagai sarana kontrol

Peraturan Desa dapat berfungsi sebagai sarana kontrol pengatur uang kas desa. Pemerintah Desa Selorejo dalam menggunakan uang kas desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes juga perlu mendapatkan kontrol atau pengawasan sebagai gambaran mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih. Penggunaan dan pengelolaan bantuan dari pemerintah daerah dapat dilihat dalam APBDes, sehingga Pemerintah Desa tidak bisa secara sepihak atau semena-mena dalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah daerah tersebut.

Seperti di ungkapkan oleh Kepala Desa Selorejo, Bapak Bambang Soponyono memaparkan sebagai berikut :

“..... Berdasarkan APBDes yang telah dibentuk maka kita dapat mengetahui secara jelas mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan kas desa. Pemerintah desa di sini membentuk peraturan desa bersama BPD secara terbuka. Sehingga, dapat dihindarkan praktek manipulasi atau penyelewengan anggaran yang diterima dari pemerintah daerah yang dapat menjadikan warga desa akan mudah untuk mengetahuinya, selain itu setiap akhir tahun ada laporan tentang pertanggung jawaban dari pemerintah desa kepada pemerintah daerah tentang penggunaan keuangan tersebut jadi keuangan yang diterima benar-sangat diperhatikan alur penggunaannya.”

(Wawancara Tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono pukul 19:00)

Bentuk pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu antara lain :

a) Pengawasan struktural

- Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat yang bertindak sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Pemerintahan sekaligus Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Malang selaku Pengawas dan Pengendali Tingkat Kabupaten Malang.

b) Pengawasan Fungsional terdiri atas :

- Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengawas Daerah Provinsi (BAWASDAPROP)
- Badan Pengawas Daerah Kabupaten (BAWASDAKAB)

c) Pengawasan masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan pengawasan yang dilakukan dapat berupa memberikan saran, kritikan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa dapat berjalan dengan efisien.

Ketua BPD Desa Selorejo, Bapak Suwadi menjelaskan tentang fungsi Peraturan Desa sebagai kontrol yaitu :

“..... Berdasarkan diterapkannya peraturan desa seperti peraturan tentang APBDes, lebih memudahkan untuk melakukan pengawasan mengenai pengalokasian dana apakah pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini jelas lebih menekan aparatur pemerintah desa agar tidak mengalokasikan dana kepada hal-hal yang menurut masyarakat tidak terlalu penting, namun jikalau ada pengerjaan program pemerintah desa yang tidak tepat sasaran maka masyarakat desa dapat melaporkannya kepada pihak BPD untuk kami tindaklanjuti mengenai keterangannya kepada pemerintah desa”

(Wawancara tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Peraturan Desa yang berfungsi sebagai kontrol dan pengawasan terhadap keuangan desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku

anggaran pemerintahan desa wajib untuk segera membentuk Peraturan Desa tentang Pelaporan Perhitungan APBDes yang berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan desa kepada Kepala Daerah.

2) Peraturan Desa yang Berfungsi untuk Merancang dan Memperlancar Kegiatan Pembangunan desa

Perkembangan di Desa Selorejo sudah berjalan dengan baik meskipun progres yang dihasilkan masih berjalan lambat, hal ini dapat membantu pemerintah desa di dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk proses pembangunan dan kesejahteraan dalam bidang lainnya, hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono sebagai berikut:

“.... Berdasarkan apa yang telah kami (pemerintah Desa) kerjakan, peraturan desa sangat membantu didalam kelancaran proses pembangunan dan kesejahteraan di desa, bisa diambil contoh mengenai program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2014 kemarin tidak terlepas dari laporan mengenai proses pembangunan tahun sebelumnya, jika ada proyek pembangunan yang dilakukan belum selesai maka pemerintah desa dapat mengalokasikan dana lagi untuk proses pembangunan tersebut. Dapat disimpulkan dengan melihat laporan program pembangunan yang telah selesai dilakukan sebelumnya, maka mempermudah pemerintah desa didalam merencanakan dan menjalankan program pembangunan baru dibidang yang lainnya, agar dana yang diterima oleh desa dapat dialokasikan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan dalam penerapannya.”

(Wawancara tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Penerapan Peraturan Desa disini berfungsi untuk merancang dan mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan ataupun program-program yang telah dicanangkan agar bisa dijalankan yang sesuai dengan target dan selesai tepat waktu.

3) Peraturan Desa Berfungsi sebagai sarana pelaksanaan Desentralisasi

Dengan berlandaskan asas desentralisasi maka pemerintah desa dapat melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang ada di atasnya. Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (7) yaitu, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan berdasarkan Undang-undang tersebut maka Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan sebagian pelimpahan wewenang dalam melaksanakan Peraturan Desa, dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono menjelaskan tentang pentingnya proses sosialisasi disini, yaitu sebagai berikut :

“Sejak diberlakukannya desentralisasi, pemerintah desa disini diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan proses rumah tangga pemerintahannya sendiri, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah dapat mengatur desa kami sendiri. Jadi apa yang menjadi kebutuhan di Desa Selorejo mampu dengan tanggap direspon oleh pemerintah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa yang akan diberlakukan. Seandainya tidak ada kewenangan untuk menjalankan proses desentralisasi tersebut, maka semua kebutuhan diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah desa hanya bertugas menjalankannya saja, tetapi itu semua belum tentu sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing desa yang berbeda-beda. Dengan adanya proses desentralisasi yang diberlakukan di pemerintahan desa maka pelaksanaan pemerintahan di Desa Selorejo dapat berjalan lebih mudah. Karena yang lebih mengetahui kebutuhan warga desanya adalah pemerintah yang paling dekat dengan warganya.”

(Wawancara tanggal 22 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Dengan diberlakukannya pelimpahan wewenang tersebut, Pemerintah Desa akan lebih cepat merespon untuk kebutuhan warga desanya. Peraturan apa yang bersifat lebih penting untuk ditetapkan akan dengan cepat dibuat

sehingga memperlancar proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan.

- 4) Peraturan Desa berfungsi sebagai Sarana Penampung dan Penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat

Didalam proses pembentukan Peraturan Desa, Pemerintah desa selalu berkesinambungan untuk mengadakan musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan termasuk yang dilakukan oleh BPD bersama beberapa tokoh masyarakat yang dinilai mampu mewakili permasalahan yang timbul dilingkungan masyarakatnya. Dari hasil musyawarah yang dilakukan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Pada APBDes tahun 2014 juga memuat aspirasi masyarakat untuk proses pengaspalan jalan dan pembenahan saluran pembuangan air. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo dan pemerintah desa dinilai proaktif dalam menanggapi keluhan dan kepentingan warga desa. Tetapi akan berjalan lebih efektif seandainya warga desa juga turut memanfaatkan kemudahan tersebut untuk menyalurkan kepentingannya kepada BPD sebagai lembaga fasilitator masyarakat desa.

- 5) Peraturan Desa sebagai Sarana Koordinasi

Berdasarkan landasan bahwa Peraturan Desa berfungsi sebagai sarana koordinasi, maka Peraturan Desa yang dibuat selalu dilaksanakan dengan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan baik, semua hal yang mengenai kepentingan bersama dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam forum-forum rapat, berdasar hasil dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a) Rapat sosialisasi rancangan Peraturan Desa APBDes dan dana DPD/K tahun 2014 ditentukan juga fokus pembangunan fisik yang diutamakan di dusun Kebo Gerang dengan mengaspal jalan yang masih berupa tanah.
- b) Dana DPD/K yang dialokasikan untuk RT/RW difokuskan untuk bantuan biaya perjalanan dinas.
- c) Dana yang diperoleh dari kekayaan desa dan bantuan dari pemerintah daerah diperuntukkan untuk mengadakan hajatan desa yang berupa Ruwah Deso.
- d) Dana Operasional pemerintah desa untuk keperluan perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, ATK, sarana kerja dan pelaporan.

Minimnya permasalahan yang muncul dan lancarnya semua proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Selorejo juga tergantung dari baiknya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD maupun dengan masyarakat desa.

6) Peraturan Desa sebagai Sarana Pendelegasian Wewenang

Kepala desa dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para anggotanya, para perangkat desa dibawahnya maupun dengan menunjuk tim kerja di bawah perintahnya. Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu mengenai Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 tentang APBDes, Kepala Desa diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya dalam realisasi pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa melimpahkan kewenangannya kepada perangkat desa yang berkompetensi terhadap kegiatan pembangunan dan kesejahteraan di Desa Selorejo.

Kepala Desa Selorejo disini mengambil langkah dengan membuat Keputusan Kepala Desa Nomor 2 tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Proyek Pembangunan.

Karena tidak dimungkinkannya Kepala Desa menangani semua urusan yang ada di desanya, maka Kepala Desa mengambil langkah dengan melimpahkan wewenangnya untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di desa pada tim yang dibentuknya. Hal tersebut berdasarkan penyampaian yang dilakukan Kepala Desa Selorejo Bapak Bambang Soponyono sebagai berikut :

“..... Di dalam proses menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa, saya bisa menunjuk anggota pemerintah desa yang lain atau juga membentuk tim kerja untuk membantu melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan. Karena tidak mungkin semua permasalahan saya tangani sendiri, tujuan akhir dari penunjukan yang saya lakukan adalah untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan yang berjalan dan tim tersebut bertanggung jawab langsung kepada saya selaku kepala desa.”

(Wawancara 22 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Tetapi tidak semua pekerjaan atau tugas Kepala Desa dapat dilimpahkan kepada bawahan atau tim kerja. Karena pada hakekatnya Kepala Desa juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang akan dipertanggung jawabkan pada setiap tahun kerjanya. Jadi seorang Kepala Desa tidak boleh semaunya sendiri dalam melimpahkan kewenangannya, hanya tugas-tugas tertentu saja yang boleh dilimpahkan.

- 7) Peraturan Desa sebagai sarana untuk membentuk integrasi kelompok-kelompok masyarakat.

Didalam tugasnya untuk menjalankan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat menyatukan atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat dalam satu objek prioritas saja. Yaitu mengenai persoalan apa saja yang lebih diprioritaskan dan lebih mendesak untuk segera dilaksanakan. Hal ini dapat terwujud dalam musyawarah antara Kepala Desa dan perangkat desa, Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dan warga masyarakat. Berdasarkan data dokumentasi yang didapat penulis di lapangan adalah sebagai berikut :

- a) Rapat sosialisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2013 terutama menyangkut fokus dana DPD/K yang setuju untuk diprioritaskan untuk pengaspalan jalan di dusun Kebo Gerang.
- b) Berdasarkan hasil musyawarah dana swadaya yang terkumpul dari masyarakat pada triwulan pertama diprioritaskan untuk kepentingan Ruwah Deso.

Masyarakat desa yang beragam kepentingan dan permasalahan yang dihadapinya tidak mungkin satu persatu keinginannya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa, BPD bersama Kepala Desa harus mampu untuk menyatukan aspirasi dan kepentingan tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diabaikan suaranya. BPD sebagai fasilitator atau penyambung suara warga desa mengenai permasalahan yang dihadapinya harus mampu mengkoordinir dan memusyawarahkannya bersama-sama Kepala Desa dalam sebuah Peraturan Desa yang sesuai dengan harapan warganya.

4. Faktor penghambat dan pendukung Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD yang bertugas sebagai mitra kerja, perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tersebut meliputi:

a. Faktor Pendukung

Kepala Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Bapak Bambang

Soponyono menjelaskan bahwa:

“..... Berdasarkan apa yang saya lihat selama proses penyusunan Peraturan desa ini, faktor pendukung yang paling terlihat adalah bagus nya kerjasama antara pihak Pemerintah Desa dengan pihak BPD, hal ini sangat memudahkan kedua belah pihak didalam proses penyusunan peraturan desa, koordinasi, komunikasi, serta itikad yang baik guna memberdayakan masyarakat di desa Selorejo menjadikan proses penyusunan Peraturan Desa ini berjalan lancar”

(wawancara pada tanggal 23 November 2014 di Kediaman Bapak Bambang Soponyono)

Menurut penilaian penulis sendiri mengenai faktor pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa di dalam penyusunan peraturan desa adalah terjalinnya hubungan yang baik antara Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan BPD selaku lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Kepala Desa dan BPD disini diposisikan sebagai mitra kerja yang bertugas untuk saling mendukung dan membantu bukan untuk saling menentang atau menjatuhkan satu sama lain, faktor kunci inilah yang menjadikan faktor pendukung yang paling signifikan terhadap penyusunan peraturan desa.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Suwadi, beliau menuturkan:

“..... Banyak faktor-faktor yang menjadi pendukung di dalam penyusunan peraturan desa sejak awal proses penyusunan sampai pada tahap akhir, salah satunya yaitu lancarnya hubungan antara pihak BPD dengan Pemerintah Desa di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa, hal ini sangat mempengaruhi bagaimana proses, tenaga dan waktu yang harus di curahkan dalam Penyusunan Peraturan Desa ini, ketika hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan baik maka segala sesuatunya yang berhubungan dengan proses penyusunan peraturan desa tersebut akan berjalan dengan mudah”

(Wawancara tanggal 23 November 2014 di Kediaman Bapak Suwadi)

Sedangkan menurut Bapak Imam Wahyudi selaku Seksi Pembangunan di Desa Selorejo, beliau menuturkan:

“..... Menurut pandangan saya, faktor pendukung proses penyusunan peraturan desa selama ini adalah mulai membaiknya respon dari Masyarakat Desa Selorejo terhadap proses penyusunan Peraturan Desa, dengan baiknya respon dari masyarakat maka Pemerintah Desa bisa melihat dan menilai secara langsung Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan acuan utama kami di dalam penyusunan peraturan desa yang kami buat bersama BPD”

(wawancara pada tanggal 23 November 2014 di Kediaman Bapak Giman)

Hasil wawancara ditutup penjabaran dari Bapak Mat Sidik, selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Beliau menyampaikan:

“..... Loyalitas, dedikasi dan tingginya semangat kerja semua Anggota BPD dan Pemerintah Desa di dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa merupakan faktor pendukung yang sangat saya rasakan selama proses penyusunan peraturan desa, hal ini dikarenakan kesamaan visi dan misi kedua belah pihak untuk memajukan, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa Selorejo secara keseluruhan”

(Wawancara pada tanggal 23 November 2014 Bertempat di Kediaman Bapak Mat Sidik)

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang paling penting di dalam proses penyusunan peraturan desa adalah hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dengan BPD, karena dengan berjalannya hubungan yang baik antara kedua belah pihak, maka peraturan yang dibuat tidak akan mengalami kendala yang berarti, selain itu membaiknya peran serta masyarakat Desa Selorejo juga menjadikan faktor pendukung di dalam proses penyusunan peraturan desa, karena peraturan desa dibuat dari dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Faktor pendukung internal adalah faktor pendukung yang berasal dari dalam organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun di dalam Pemerintah

Desa yang di pimpin oleh Kepala Desa, faktor ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa terhadap sasaran-sasaran yang akan dicapai, dari faktor pendukung internal yang penulis temui didalam penyusunan peraturan desa kali ini adalah baiknya hubungan Kepala Desa dengan BPD, loyalitas yang tinggi dari para anggota BPD, dan kesungguhan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa di Desa Selorejo, sedangkan faktor pendukung Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Pemerintah Desa maupun dari pihak BPD, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung eksternal adalah mulai meningkatnya peran aktif masyarakat desa meskipun masih dinilai kurang.

b. Faktor Penghambat

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh BPD bersama Pemerintah Desa di dalam proses penyusunan peraturan desa, dan jika dibiarkan maka hal ini akan menjadi permasalahan yang kompleks diwaktu yang akan datang ketika menyusun peraturan desa di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suwono selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selorejo, beliau menjelaskan:

“..... Dalam proses penyusunan peraturan desa masih banyak kendala yang kami hadapi, salah satunya yaitu masih dominannya peran Kepala Desa di dalam Pengesahan Peraturan Desa, meskipun di dalam proses penyusunan peraturan desa dilibatkan pihak BPD dan Masyarakat yang di ikut sertakan secara langsung terhadap proses penyusunan peraturan desa, tetapi peran Kepala Desa masih mendominasi di dalam hasil akhirnya, namun Kepala Desa yang saat ini tidak sedominan Kepala Desa pada periode-periode sebelumnya yang terlalu mendominasi Proses dan Hasil akhir dari penyusunan Peraturan Desa, Bapak Bambang Soponyono selaku Kepala Desa

Selorejo saat ini masih mempertimbangkan dan memilah-milah Peraturan Seperti apa yang cocok untuk diterapkan di Masyarakatnya”

(wawancara pada tanggal 23 November 2014 di Kediaman Bapak Suwono)

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Jama'ari, selaku Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, beliau menuturkan:

“..... Faktor penghambat yang masih terlihat di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa yaitu masih kurangnya peran serta peran masyarakat, memang ada peningkatan kontribusi masyarakat desa terhadap proses penyusunan peraturan desa dibandingkan pada proses penyusunan peraturan desa sebelumnya, namun disini masyarakat cenderung hanya mengungkapkan aspirasinya saja, dan menyerahkan proses selanjutnya kepada Pemerintah Desa atau BPD, mungkin hal ini dikarenakan masyarakat lebih mementingkan aktifitas sehari-harinya, kami memaklumi karena tingkat ekonomi masyarakat di Desa Selorejo ini masih dominan ditingkat menengah ke bawah”

(wawancara pada tanggal 23 November 2014 di Kediaman Bapak Jama'ari)

Faktor penghambat disini bisa berasal dari dalam maupun dari luar BPD maupun Pemerintah Desa hal ini penulis rasa masih banyak terjadi salah satunya adalah dominasi peran Kepala Desa didalam penyusunan Peraturan Desa, dominasi Kepala Desa didalam penyusunan peraturan desa hendaknya sedikit demi sedikit dihilangkan karena hal ini akan menjadi kebiasaan didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa hendaknya jauh lebih mementingkan kepentingan masyarakat desanya, dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, tetapi tidak semua permasalahan yang terjadi dimasyarakat desa bisa diselesaikan karena sumber pendanaan desa untuk proses memajukan desa masih bersifat minim karena mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah yang ada diatasnya, dari sumber kekayaan desa maupun bantuan dari masyarakat desa Selorejo itu sendiri.

Bapak Bambang Soponyono, Sebagai Kepala Desa menuturkan bahwa faktor penghambat di dalam proses penyusunan peraturan desa ini adalah:

“..... Faktor penghambat di dalam penerapan peraturan desa yang telah ditetapkan yaitu soal anggaran biaya yang terbatas, hal ini mempengaruhi seberapa jauh Pemerintah Desa di dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, saya memaklumi karena jika dilihat dari semua permasalahan yang ada tidak akan dapat di selesaikan dalam waktu yang sebentar jika mengandalkan kekayaan desa dan alokasi pendanaan yang berasal dari Daerah atau Kabupaten, juga terbatas karena Desa di Kabupaten Malang termasuk banyak jadi pendanaan yang di anggarkan harus di bagi rata” (wawancara pada tanggal 23 November 2014)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan faktor penghambat yang muncul di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa yaitu masih dominannya Peran Kepala Desa di dalam hasil akhir Penyusunan peraturan Desa, meskipun saat ini pengaruh Kepala Desa lebih berkurang di bandingkan dengan Kepala Desa di waktu yang lalu, namun hal ini tetap terjadi di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Selorejo selain itu faktor penghambat dari luar pemerintah desa didalam penyusunan peraturan desa adalah masih kurangnya peran aktif masyarakat desa di dalam penyusunan peraturan desa, masyarakat desa hanya menyuarkan permasalahan yang dihadapinya tetapi masyarakat desa menyerahkan proses selanjutnya kepada Pemerintah Desa yang diharapkan mampu mengolahnya ke dalam peraturan desa yang akan diterapkan

C. Pembahasan

1. Kinerja BPD dilihat dari Kemampuan anggota BPD

Mahsun mendefinisikan “kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi” Mahsun (2006:25). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok

individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas pokok sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di desa dan mempunyai tugas pokok sebagai mitra kerja Kepala Desa didalam penyusunan peraturan desa, dari tugas pokok tersebut ditetapkan tujuan, visi dan misi BPD Desa Selorejo serta keefektifan BPD didalam mencapai tujuan tersebut. Didalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kinerja aparat yang baik dan berkompeten didalam menjalankan tugasnya, untuk itu melalui capaian kinerja yang baik, semangat kerja yang baik, dan peran aktif BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa didalam penyusunan peraturan desa, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD bersama Kepala Desa didalam membentuk peraturan desa sangatlah diperlukan agar dalam mencapai tujuan pokok BPD Desa Selorejo dapat tercapai.

a. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

Dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor. 12 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang disebutkan sebagai kinerja BPD adalah meliputi tugas dan wewenang BPD itu sendiri, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dalam tugas dan wewenang BPD pada nomor 1 (satu) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disini BPD berfungsi sebagai suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat, yang dapat dicontohkan dengan beberapa laporan masyarakat desa kepada Kepala BPD :

- 1) Laporan warga kepada ketua BPD, mengenai saluran air yang tidak lancar.
- 2) Jalan umum desa yang belum diaspal.
- 3) Jalan umum desa yang perlu diperbaiki atau perlu dilakukan penambalan.
- 4) Laporan salah satu warga ketika PUSKESDES (Pusat Kesehatan Desa) tidak beroperasi pada jam kerja ketika dibutuhkan.

Beberapa contoh laporan warga di atas diungkapkan oleh masyarakat desa kepada BPD, kemudian BPD mengajukan usulan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menindak lanjuti laporan BPD tersebut agar dilakukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Disinilah kemampuan anggota BPD difungsikan yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa.

Hal diatas sesuai dengan proses Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Hasibuan yang menyatakan bahwa “kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan” Hasibuan (2001:105) sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang cepat, tepat sasaran, dan berlandaskan keterbukaan. Sehingga diharapkan

munculnya penyelenggaran pemerintah desa yang lebih mengutamakan pemerintah yang aspiratif, dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat di desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai cukup baik didalam mewujudkan keterbukaan hal tersebut dapat dilihat dari proses kinerja anggota BPD dalam menerima keluhan akan permasalahan yang di hadapi masyarakat desa maupun saran yang diberikan oleh masyarakat, yang kemudian diteruskan laporan-laporan tersebut kepada Kepala Desa dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang akan dibahas didalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan otonomi daerah berdasarkan atas tujuan pokok untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat des dengan selalu menitik beratkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

b. Semangat kerja anggota BPD

Kinerja dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, menurut Swanson dan Holton III “terdapat 3 jenis kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu” Swanson dan Holton III (1999:73). Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumberdayanya.

Kinerja Proses, menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi akan memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu, di desain sebagai suatu sistem, memiliki kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas, dan tepat waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan individu sesuai dengan misi organisasi, apakah individu mengalami hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, apakah para individu memiliki mental, fisik dan emosi dalam bekerja, dan apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja.

Klasifikasi kinerja yang disampaikan diatas membawa suatu implikasi bahwa konsep tentang kinerja seharusnya diartikan secara luas baik dalam tatanan organisasi, dalam proses dan dalam tingkatan individual, dimana semuanya sama-sama penting. Ketiga tingkatan kinerja ini saling terkait dan sama-sama menentukan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga dan mungkin perlu dibudayakan atau bahkan diwajibkan penilaian kinerja dalam tataran organisasi dan proses, dan tidak semata kinerja individu sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Kinerja (*performance*) mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai dari kerja tersebut. Kinerja merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional yang diikuti pula dengan pengukurannya yang bervariasi pula karena sangat tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk

kinerja. Rogers dalam Mahmudi berpendapat bahwa “kinerja semestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcome of work*), dengan pendapat bahwa hasil kerja memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi” Rogers dalam Mahmudi (2007:6).

Di samping itu, Mahsun mendefinisikan “kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi” Mahsun (2006:25). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menurut Prabu Mangkunegara “kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya” Prabu Mangkunegara (2000:67).

Menurut kamus Administrasi Publik, pengukuran kinerja adalah “... *an evaluation of an employee's progress measures in terms of job effectiveness.....*” (Chandler dan Plano, 1998:293). Yang mengartikan batasan ini lebih menekankan

evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan setiap individu bagi organisasinya, dan tujuannya terdiri atas dua, yaitu memberikan insentif/disinsentif kepada hasil kerja yang dicapai pada masa lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja menurut Mahsun antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian dan sasaran-sasaran organisasi
- 4) Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas) (Mahsun, 2006:26).

Oleh karena sifat dan karakteristiknya, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat laba, tidak hanya efisien dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi beberapa aspek, antara lain menurut Mahsun:

- 1) Kelompok *Input*, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Kelompok *process*, adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3) Kelompok *output*, adalah sesuatu yang diharapkan langsung agar dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud

- 4) Kelompok *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- 5) Kelompok *benefit*, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 6) Kelompok *impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif (Mahsun 2006:31).

Berdasarkan beberapa aspek kinerja diatas yang harus diukur pada organisasi sektor publik tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor publik ini. Penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibanding dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang agar kemampuannya bisa berada di atas rata-rata.

Jika penilaian kinerja diarahkan untuk memacu kinerja seseorang itu sendiri, maka penilaian kinerja identik dengan upaya memberi motivasi. Motivasi inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memicu produktivitas seseorang. Dengan demikian, kehadiran suatu sistem penilaian yang baik yang ditopang oleh aspek validitas, reliabilitas dan relevansi merupakan kunci yang menentukan efektivitas sebuah proses penilaian kinerja. Hal itu penting untuk menjamin adanya kepuasan kerja yang dinikmati oleh pihak yang dinilai yang pada gilirannya akan semakin memacu tingkat kinerjanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Siagian (1994:53) bahwa sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam

memberikan imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai dalam menentukan rencana kariernya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja pegawai dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga sebagai untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara cepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kompetensinya kepada pegawai sehingga dalam melaksanakan pekerjaan akan lebih baik untuk sekarang dan masa mendatang, serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penghargaan jasa atas kinerjanya yang baik.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara (2000:67) adalah:

- a) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan yang terdahulu.
- c) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, serta meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.

- d) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah (Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara 2000:67).

Kegunaan penilaian prestasi kinerja karyawan adalah:

- a) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.
- b) Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- c) Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam organisasi.
- d) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi.
- e) Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam satu organisasi.
- f) Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga tercipta *performance* yang baik.
- g) Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.
- h) Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan.
- i) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.

- j) Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (*job decription*) (Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara 2000:67).

Indikator yang menunjukkan munculnya semangat kerja pegawai antara lain yaitu, kesadaran untuk bekerja sama di dalam mencapai tujuan organisasi, totalitas pada organisasi, kuatnya etos kerja pegawai didalam organisasi atau kemampuan individu-individu didalam organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit, tingginya tingkat minat anggota BPD kepada pekerjaan dan organisasi yang menaunginya, berjalannya proses demokrasi dalam hal kebebasan mengeluarkan aspirasi yang masih bersifat wajar, munculnya rasa bangga para pegawai terhadap organisasi dimana mereka bekerja.

Semangat kerja berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan setiap anggota karena semangat kerja berkaitan dengan tingkat kepuasan para anggota itu sendiri terhadap pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan. Supaya mampu menumbuhkan bentuk pemahaman yang lebih terhadap penerapan pekerjaannya diperlukan suatu kerjasama yang baik antar para anggota agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan benar.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo dalam melaksanakan tugasnya memang selalu bekerja sama, tetapi semangat kerja yang mereka tunjukkan penulis rasa masih bersifat kurang, berdasarkan dari beberapa hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyerahkan sepenuhnya hasil akhir dari musyawarah tentang penyusunan peraturan desa kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dirasa kurang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menentukan hasil akhir dari Proses Penyusunan Peraturan Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo dalam Pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya belum berjalan baik.

2. Proses Kinerja dalam Pembentukan Peraturan Desa oleh BPD dan Kepala Desa

a. Usulan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil data wawancara yang diperoleh penulis di lapangan, menunjukkan bahwa usulan pembentukan Peraturan Desa bisa berasal dari Bapak Bambang Soponyono selaku Kelapa Desa yang memang telah tertera didalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2006 tentang wewenang Kepala Desa yaitu mengajukan rancangan Peraturan Desa atau bisa disebut juga dengan usulan pembentukan Peraturan Desa. Tetapi usulan juga bisa datang dari masyarakat melalui rapat BPD atau atas inisiatif BPD itu sendiri yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi yang harus lebih diprioritaskan dalam penyajian materi Peraturan Desa tersebut yaitu harus berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dan membawa keinginan maupun aspirasi masyarakat desa.

Selanjutnya didalam pembuatan serta perumusan peraturan desa BPD ikut turut serta tetapi dominasi Kepala Desa masih mendominasi. Jika dilihat dari tahap usulan, penyusunan peraturan desa dimana Pemerintah Desa yang lebih diwakilkan oleh Kepala Desa bertindak sebagai pucuk pimpinannya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai instansi atau lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa menggambarkan adanya hubungan yang terjalin baik antara pihak Kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa akan tetapi dalam penyusunan Peraturan Desa, Kepala Desa Selorejo masih mendominasi.

b. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan penjabaran dan dari data yang diperoleh penulis di lapangan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Selorejo selaku penggagas Peraturan Desa tersebut sudah melakukan tahapan yang sesuai dan tidak menyimpang dengan Undang-Undang yang berlaku secara hukum. Dalam pembentukan Peraturan Desa, tahap perencanaan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi kadar kualitas hukum maupun bobot keterkaitan antara peraturan desa yang akan dihasilkan dengan masukan-masukan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat desa pada kenyataannya dari peraturan desa yang akan dihasilkan nantinya.

Kepala Desa bersama-sama dengan BPD telah melakukan rapat untuk membahas persiapan pembentukan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi kepada masyarakat desa hingga pengesahan dan penyebarluasan, perencanaan mengenai materi dan dasar hukum bagi peraturan desa yang akan dibuat dan

diterapkan. Perencanaan mengenai penyusunan peraturan desa ini merupakan gambaran yang baik dari sebuah kinerja antara Kepala Desa bersama BPD.

Beberapa pakar banyak mendefinisikan tentang kinerja secara umum, antara lain diungkapkan oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai suatu “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi” Lembaga Administrasi Negara (2000:3)

Penjelasan dari Hasibuan bahwa “kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan keungguhan” Hasibuan (2001:105). Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya kinerja menekankan apa yang keluar (outcome) bila ditelaah lebih lanjut kinerja yang dilakukan dari suatu jabatan atau pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi sebuah output (hasil kerja).

Penggunaan beberapa indikator kunci untuk mengukur hasil kerja individu berasal dari beberapa fungsi yang diartikan dalam kegiatan atau tindakan dengan berlandaskan standar yang jelas dan tertulis. Karena kinerja mengandung komponen kompetensi dan lebih menekankan pada produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu didalam proses pencapaiannya. Gibson menyatakan terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku individu, yaitu:

- a) Variabel individu, yang meliputi kemampuan dan ketrampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur dan jenis kelamin,

asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan kinerja;

- b) Variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan struktur dan desain pekerjaan;
- c) Variabel psikologis, yakni persepsi sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit di ukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda satu sama lainnya (Gibson 1996:76).

c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil observasi yang telah diperoleh penulis dari lapangan, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah melakukan rapat untuk membahas persiapan pembentukan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi peraturan desa hingga pengesahan dan penyebarluasan peraturan desa, perencanaan mengenai materi dan dasar hukum bagi peraturan desa yang akan dibuat melalui forum rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun atas inisiatif dari masyarakat desa Selorejo sendiri. Tahapan selanjutnya yang juga termasuk dalam tahap persiapan dan perencanaan sebuah peraturan desa adalah proses sosialisasi rancangan Peraturan Desa. Data yang diperoleh penulis dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Suwadi menyatakan bahwa sebuah draf rancangan Peraturan

Desa harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat desa sebelum ditindak lanjuti, dengan tujuan utama untuk lebih menekankan transparansi mengenai materi inti dari peraturan desa yang akan dibuat dan diterapkan di desa Selorejo.

Melalui proses sosialisasi tersebut, warga desa akan mengerti tentang isi dari peraturan desa yang akan dibuat. Masyarakat desa juga diberi kesempatan untuk mengajukan usulan, masukan, gagasan ataupun keinginan mereka jika peraturan desa tidak sesuai dengan permasalahan yang di hadapi masyarakat desa pada kenyataannya. Hal ini selain untuk menurutsertakan peran aktif masyarakat desa didalam proses penyusunan Peraturan Desa, juga untuk melatih kepekaan warga desa terhadap proses demokrasi yang diterapkan di desa.

Langkah-langkah yang dikerjakan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa “dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi keterbukaan.”

Keterbukaan lebih ditekankan bahwa proses pembentukan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan peraturan desa bersifat transparan dan terbuka, dengan tujuan utama seluruh lapisan masyarakat di desa tanpa memandang strata sosial di belakangnya, mempunyai kesempatan yang sama dan sebebaskan-bebasnya dalam memberikan masukan pada proses penyusunan Peraturan Desa tersebut. Keterbukaan dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis sudah sesuai dengan

transparansi mengenai pokok peraturan desa yang akan dibuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa, yang akan disampaikan dalam rapat sosialisasi dimana masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan ide ataupun masukan mereka jika peraturan desa yang akan diterapkan didesanya tidak sesuai dengan permasalahan yang ada, dimana proses sosialisasi ini termasuk dalam tahap persiapan pembentukan Peraturan Desa.

Jika dilihat dari tahap persiapan peraturan desa dimana Pemerintah Desa dan Kepala Desa berperan sebagai pucuk pimpinannya, mengajukan draf rancangan Peraturan Desa, dan pada tahap sosialisasi Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mensosialisasikan rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa. Dilihat dari kondusifnya dan tidak ada permasalahan yang muncul dalam proses sosialisasi dan dalam rapat tersebut telah memenuhi kuota persyaratan, hampir seluruh lapisan masyarakat hadir dan jumlahnya tercukupi. Namun sebagian besar peserta yang hadir tidak mencantumkan tanda tangan dan nama perindividu tertulis tidak jelas.

d. Perumusan Peraturan Desa

Tahap perumusan peraturan desa dilakukan setelah tahap persiapan dimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD yang mengikutsertakan peran masyarakat desa dalam rapat. Sedangkan dalam tahap perumusannya, dibahas kembali antara Kepala Desa dan para anggotanya. Rumusan peraturan tersebut berasal dari hasil rapat sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa bersama BPD dengan

mengikutsertakan peran masyarakat desa. Dari data yang diperoleh penulis, maksud dan tujuan sosialisasi tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat desa agar lebih aktif di dalam proses penyusunan Peraturan Desa.
- 2) Menampung masukan, aspirasi, permasalahan dan saran dari masyarakat desa secara langsung agar Peraturan Desa yang dibuat dan akan diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal diatas sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana disini sudah diterapkan pada tahap sosialisasi pada Pemerintah Desa Selorejo bersama BPD, dan proses ini berjalan cukup baik dan bersifat kondusif.

Aktifnya peran serta masyarakat desa dalam memberikan masukan, saran dan usul membuktikan bahwa masyarakat lebih tanggap terhadap desa mereka jika dibandingkan dengan proses penyusunan peraturan desa pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada akhirnya nanti Peraturan Desa tersebut adalah untuk warga desa itu sendiri. Dari beberapa masukan tersebut Pemerintah Desa Selorejo merumuskan suatu peraturan desa. Dengan mempertimbangkan isi dari rumusan Peraturan Desa yang dirumuskan, Pemerintah Desa Selorejo telah menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak mengabaikan kepentingan dan hak warga desanya.

e. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Dengan hasil data dan dari keadaan sebenarnya yang di dapat penulis di lapangan, pada tahap pembahasan rumusan penyusunan Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama Anggota Pemerintah Desa lainnya yang mengundang BPD dan perwakilan perangkat daerah yang fungsinya sebagai pemberi saran dan pertimbangan dari peraturan desa yang akan dibuat. Sesuai dengan pembahasan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2014 dilaksanakan pada 2 November 2014, bertempat di sekretariat BPD Desa Selorejo, dengan peserta rapat dihadiri oleh :

- 1) Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris BPD dan semua anggota BPD lainnya.
- 2) Pemerintah Desa berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 3 Kepala Urusan .
4. Perangkat Daerah berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Bagus Setiawan SE selaku Sekretaris Kecamatan Dau, Bapak Hadi Kuncahyo selaku Kepala seksi Pemerintahan, dan Bapak Wasito selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, kapasitasnya adalah sebagai perangkat daerah mewakili Camat Kecamatan Dau yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan atas perumusan peraturan desa yang akan ditetapkan.

Terdapat beberapa masukan atau usulan dari pihak-pihak terkait yaitu antara lain Ketua BPD, Kepala Urusan Pembangunan BPD, Sekretaris Kecamatan Dau sehingga dapat tercapai kesepakatan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2013 dan diterbitkannya beberapa Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan penjelasan uraian pada temuan di lapangan,

dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan dan teknik penyusunan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

“..... Draf rancangan Peraturan Desa atas gagasan Pemerintah Desa Selorejo yang terdiri dari Kepala Desa dan Anggota Pemerintah Desa lainnya, yang sudah melalui proses sosialisasi kepada masyarakat desa dalam forum rapat, kemudian diadakan perumusan kembali sebelum dibahas dalam forum rapat BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya rumusan rancangan Peraturan Desa tersebut dikirim kepada BPD melalui Carik selambat-lambatnya 3 hari sebelum rapat pembahasan. Dalam rapat tersebut Kepala Desa memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai materi pokok Peraturan Desa yang diajukan”.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan berjalannya rapat atau musyawarah pembahasan peraturan desa yang berjalan lancar dan rumusan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa disetujui dalam Rapat Pembahasan oleh BPD, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berjalan baik antara Kepala Desa selaku Pemerintah Desa bersama BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Keduanya saling mendukung sesuai dengan tugas pokok, kesadaran dan kewajibannya masing-masing.

f. Pengesahan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis BPD sudah melaksanakan Rapat Paripurna BPD dalam rangka untuk mengesahkan Peraturan Desa. Pada rapat tersebut pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat tanpa adanya proses voting yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Selorejo sebagai berikut :

- 1) Semua rapat BPD paling sedikit di hadiri oleh $\frac{2}{3}$ jumlah anggotanya.
- 2) Proses pengesahan sedapat mungkin mengembangkan dan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan tanpa melalui voting agar tidak memakan waktu terlalu lama.
- 3) Selalu menghadirkan perangkat daerah.
- 4) BPD berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan tingkat kehadiran anggotanya dan selalu menerbitkan Keputusan BPD sebagai wujud formal persetujuan atas rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Mekanisme Rapat BPD pasal 15 sebagai berikut :

- 1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- 2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- 4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- 5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Sedangkan dari hasil proses pengesahan Peraturan Desa, Desa Selorejo berdasarkan pengamatan penulis adalah :

- 1) Proses pengesahan Peraturan Desa tidak pernah mengalami penundaan karena tingkat kehadiran anggota BPD yang sangat baik.
- 2) Proses pengesahan Peraturan Desa selama ini dibawa ke dalam forum rapat desa.

Semua hal tersebut berdasarkan pada risalah rapat BPD dan daftar hadir anggota BPD yang diperoleh di lapangan.

g. Pengundangan Peraturan Desa

Berdasarkan dengan data yang diperoleh penulis dilapangan, keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa di desa Selorejo yang sudah dijelaskan di atas telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dalam mengundang Peraturan Desa, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa (Carik) untuk mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

Peraturan Desa yang sudah diundangkan oleh pejabat yang berwenang di desa Selorejo tersebut sudah diketahui terlebih dahulu maksud dan tujuannya oleh

masyarakat desa Selorejo setelah diundangkan serta Peraturan Desa tersebut mempunyai kekuatan hukum secara sah setelah diundangkan.

h. Penyebarluasan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil observasi penulis di desa Selorejo, proses penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan dari Kepala Desa yang didahului dengan dikeluarkannya Keputusan BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa. Peran Pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebagai sarana Pembina dan pengawas terhadap Pemerintahan Desa, termasuk dalam Penetapan Peraturan Desa.

Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain-lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Desa disini tidak perlu disahkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi hanya diawasi prosesnya oleh tim evaluasi yang bertugas menilai Peraturan Desa yang dan atas persetujuan Kepala Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa apabila hal tersebut dinilai cacat hukum. Keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Selorejo yang sudah dipaparkan di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat (1) sebagai berikut, “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan.”

Jika dilihat dari segi hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selorejo, keduanya sama-sama menjalankan tugas, kewajiban maupun fungsinya masing-masing. Di mulai dari tahap sosialisasi sampai pada tahap pengesahan baik pihak BPD berperan aktif dan tidak ada upaya melawan atau pun menjatuhkan Kepala Desa.

Rumusan Peraturan Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dengan cepat dipelajari dan segera dibahas lebih lanjut. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selorejo selalu menghadiri rapat-rapat yang diadakan untuk membahas Peraturan Desa yang akan dibuat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Selorejo dapat bekerja dengan cukup baik bersama Kepala Desa dalam hal penyusunan Peraturan Desa karena berlandaskan tujuan utama untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Desa Selorejo secara keseluruhan.

3. Output dan outcome peraturan desa yang dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa Selorejo, ditinjau dari:

- a) Output jenis peraturan desa di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Peraturan desa merupakan hasil ataupun produk hukum yang dibuat dari kinerja BPD bersama Kepala Desa, Menurut Hasibuan menyatakan bahwa “kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kseungguhan” Hasibuan (2001:105). Suatu kinerja yang dilakukan pegawai didalam suatu organisasi perlu ditingkatkan

karena hal tersebut berhubungan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi, dimana kinerja harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dinilai secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dari organisasi yang menaunginya.

Dari hasil yang diperoleh penulis sudah menemukan beberapa Peraturan Desa yang telah dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang APBDes dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, dimana kedua Peraturan Desa tersebut termasuk kategori jenis peraturan desa yang wajib dibuat. BPD dan Kepala Desa sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membuat Peraturan Desa tersebut.

Kepala Desa bersama BPD juga membuat peraturan desa tentang pengadaan kegiatan Ruwah Deso yang di laksanakan karena untuk menjaga ketertban,kerukunan dan kebersihan masyarakat desa selain itu diadakan untuk menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2013.

Sedangkan Peraturan Desa jenis yang lain yaitu yang berasal dari aspirasi masyarakat, BPD juga membuatnya, Peraturan Desa yang menyangkut masalah kemasyarakatan, ataupun peraturan desa mengenai retribusi desa masih menggunakan peraturan terdahulu, karena masyarakat desa menganggap peraturan yang terdahulu masih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat saat ini.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Selorejo bukannya tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menampung atau menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, akan tetapi kebutuhan dari Peraturan Desa tersebut belum ada, BPD sangat terbuka dan aspiratif terhadap masukan dan aspirasi masyarakat desa. Di lapangan penulis menilai justru warga desa Selorejo itu sendiri yang kurang aktif memanfaatkan haknya sebagai warga desa yang berhak mengajukan usulan atau pendapat. Seolah mereka hanya menunggu apa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desanya.

Dengan berdasarkan hasil Peraturan Desa yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa Selorejo, kinerjanya dapat dikatakan aktif, karena setiap dibutuhkan sebuah Peraturan Desa baru untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi didesa, BPD dan Kepala Desa selalu gerak cepat untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu.

- b) Outcome peraturan desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Dari ke tujuh fungsi Peraturan Desa yang sudah disebut dan jelaskan diatas, Peraturan-Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa hampir semua mewakili kriteria tersebut. Bisa diambil contoh fungsi kontrol, Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang APBDes tahun anggaran 2013, peraturan ini mengontrol penggunaan uang kas desa, dengan adanya pengaturan keuangan kas desa kepada pos-pos yang jelas, maka secara tidak langsung akan memperlancar pembangunan yang sudah direncanakan.

Fungsi koordinasi dari peraturan desa yang sudah dibuat juga tercermin dalam peraturan desa tersebut saat tahapan sosialisasi mengenai penggunaan dana bantuan desa yang berasal dari daerah. Dengan mengambil satu contoh fungsi Peraturan Desa tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa produk Peraturan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa bersama mitra kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keputusan yang diambil secara bersama dalam Peraturan Desa tersebut mewakili hampir semua komponen yang ada. Banyaknya kepentingan dan masukan dari masyarakat desa yang beragam harus dapat disatukan dan diwujudkan dalam sebuah Peraturan Desa melalui mekanisme penyusunan yang tepat sasaran dan benar sehingga tidak terjadi pihak atau kelompok tertentu yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Semua lapisan masyarakat aspirasinya sudah disampaikan, kalau pun belum hal tersebut dikarenakan adanya skala prioritas dalam program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dalam pembentukan peraturan desa.

Dari data dan pengamatan yang penulis peroleh di lapangan, selama berlangsungnya pemerintahan desa saat ini tidak ada satupun Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo yang ditolak diterapkan oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya protes dari pihak masyarakat desa yang menolak serta meminta perubahan peraturan desa yang telah dihasilkan oleh Kepala Desa dan BPD, karena setiap peraturan selalu disosialisasikan kepada masyarakat desa terlebih dahulu. Semua Peraturan Desa yang telah disahkan, dilaksanakan dalam kehidupan Pemerintahan Desa sehari-hari di desa Selorejo.

4. Faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa

Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Selorejo antara lain pihak Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Anggotanya, pihak BPD yang berfungsi sebagai mitra kerja Kepala Desa di dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa, dan ikut serta peran masyarakat desa Selorejo itu sendiri, beberapa pihak tersebut diharapkan bekerjasama dengan baik yang dapat menjadikan Proses Pembentukan Peraturan Desa berjalan dengan lebih cepat dan tepat sasaran, hal ini diharapkan menjadi faktor Pendukung di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa, namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala atau penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pembentukan peraturan desa, hal ini diharapkan dapat menjadi sarana BPD bersama Pemerintah Desa dapat memecahkan dan menemukan solusi yang tepat agar faktor penghambat tersebut dapat terselesaikan dengan baik agar Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan lancar dengan adanya faktor penghambat akan lebih meningkatkan kinerja dari BPD di dalam membentuk peraturan desa.

a. Faktor Pendukung

Dari hasil Observasi penulis di Desa Selorejo, ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pembentukan peraturan desa, yaitu antara lain:

- 1) Bagusnya kerjasama antara pihak BPD dengan pihak Pemerintah Desa di Desa Selorejo dalam proses Pembentukan Peraturan Desa

- 2) Meningkatnya peran serta Masyarakat desa Selorejo didalam Proses Pembentukan Peraturan Desa selama ini jika dibandingkan dengan Proses Pembentukan Peraturan Desa pada Periode-periode sebelumnya.
- 3) Loyalitas, dedikasi dan tingginya semangat kerja semua Anggota BPD dan Pemerintah Desa di dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai
- 5) Terjalinnnya hubungan yang baik antara BPD, Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa.

Dari beberapa faktor pendukung diatas dapat diambil garis besarnya yaitu hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dengan BPD menjadi kunci kelancaran di dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil Observasi di Desa Selorejo, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat di dalam proses Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam Proses penyusunan Peraturan Desa, yaitu:

- 1) Masih dominannya peran Kepala Desa di dalam hasil akhir atau pengesahan peraturan desa yang di berlakukan, meskipun di dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa dilibatkan pihak BPD dan masyarakat namun hasil akhir dari musyawarah desa tetap ada di tangan kepala desa, tetapi kepala desa pada periode kali ini lebih bisa dan mementingkan kepentingan banyak pihak tidak seperti Kepala Desa pada periode sebelumnya.

- 2) Masih kurangnya peran serta masyarakat di desa Selorejo, meskipun pada proses Penyusunan Peraturan Desa kali ini masyarakat cenderung lebih aktif jika di bandingkan Proses Penyusunan Peraturan Desa sebelumnya, namun dirasa pihak BPD dan Pemerintah Desa masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat desa sudah menyalurkan aspirasinya, pada tahap selanjutnya masyarakat cenderung menyerahkan proses selanjutnya kepada Aparatur Desa, persoalan ini dikarenakan konsentrasi masyarakat desa lebih dicurahkan kepada pekerjaan dan aktifitasnya sehari-hari.
- 3) Sumber Daya Manusia yang di rasa kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan Aparatur Desa dan BPD yang masih di strata SLTA, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di harapkan Anggota Pemerintah Desa dan BPD dapat lebih ditingkatkan pada periode pemerintahan yang akan datang.

Dari beberapa faktor penghambat yang disebutkan diatas, Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa mengalami hambatan karena masih dominannya Peran Kepala Desa di dalam pembentukan Peraturan Desa baik dari awal sampai akhir, hal ini memang telah terjadi dari waktu ke waktu tidak hanya terjadi pada Proses Pembentukan Peraturan Desa kali ini saja, namun hal tersebut terjadi tidak separah dulu. hal ini diharapkan dapat di temukan solusi yang tepat dan jalan keluar yang benar yang tidak berdampak saling merugikan satu pihak dengan pihak yang lainnya, dan untuk terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik di Masyarakat Desa Selorejo.

Menurut Gillin dan Gillin dalam Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi (2011:215) memaparkan dua syarat yang harus di penuhi agar interaksi sosial dapat terjadi, yaitu adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi (*communication*). Hubungan antar manusia atau relasi sosial sangat menentukan struktur masyarakat. Hubungan ini didasarkan dalam praktik komunikasi, sehingga komunikasi merupakan dasar eksistensi dari masyarakat. Hubungan antar manusia, hubungan satu dengan yang lain, baik dalam bentuk perorangan maupun dengan kelompok atau antar kelompok manusia itu sendiri menjadi sumber dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat.

Melalui adanya interaksi sosial ini Badan Permusyawaratan Desa akan dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat, baik itu melalui kontak sosial maupun komunikasi sosial terhadap masyarakat, selanjutnya akan lebih dapat menjelaskan maksud dan tujuan, melalui Sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami maksud dari Peraturan Desa yang ada dan ketaatan terhadap aturan Hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa” kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan dengan berlandaskan hasil penelitian mengenai Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa, sehingga dapat diambil kesimpulan yang dapat menjadikan masukan atau saran untuk memperbaiki mutu peraturan desa dan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa didalam hal pembangunan, kesejahteraan, dan pemerintahan didesa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di dalam kinerja dan tugasnya memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat desa maupun aparat desa didalam penyusunan peraturan desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi diantaranya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat strategis posisi penempatannya. Berdasarkan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa dilihat dari tugas pokok, jika ditinjau dari :

- a) Kinerja anggota BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difokuskan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang cepat, tepat sasaran, dan keterbukaan. Kinerja BPD dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat desanya. Sehingga diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintah desa yang mengedepankan prinsip aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup baik hal ini diwujudkan dengan keterbukaan anggota BPD menerima keluhan, kritikan maupun saran yang diberikan oleh masyarakat desa lalu diteruskan kepada Kepala Desa sehingga akan dicari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat desa kemudian mengikutsertakan peran aktif masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat desa yang akan dibahas dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa.

- b) Semangat kerja BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat di desa Selorejo dalam melaksanakan tugasnya selalu bekerjasama. Semangat kerjasama yang mereka lakukan kurang baik, dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa ketiadaan kekuatan anggota BPD di dalam menentukan hasil akhir dari perumusan peraturan desa yang sedang dijalankan. Hal tersebut dikarenakan anggota BPD seakan pasrah dengan

apa yang menjadi saran atau ketentuan yang diperintah oleh ketua BPD. Dari paparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selorejo dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai tugas dan fungsinya dilihat dari aspek semangat kerja kurang baik.

2) Proses Kinerja BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa

Dari beberapa proses penyusunan Peraturan Desa oleh BPD berama Kepala Desa mulai dari usulan, perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa, pengesahan, pengundangan, sampai pada penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Selorejo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada. Jika dilihat dari faktor hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Selorejo, keduanya sama-sama menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya.

Mulai dari tahap sosialisasi sampai pada tahap pengesahan pihak BPD juga bersifat pro aktif dan tidak ada upaya menentang atau menjatuhkan Kepala Desa hal ini dikarenakan adanya dominasi peran Kepala Desa di dalam Penyusunan Peraturan Desa, Meskipun Rumusan Peraturan Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cepat dipelajari dan segera dibahas lebih lanjut. Namun hasil akhir dari semua prosedur penyusunan peraturan desa tetap ada di tangan Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu menghadiri rapat-rapat yang diadakan untuk membahas Peraturan Desa yang akan dibuat. Peranan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Selorejo

dirasakan kurang optimal dengan mitranya yaitu Kepala Desa dalam hal penyusunan Peraturan Desa.

b. Output dan Outcome Peraturan Desa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desa jika ditinjau dari :

a) Output Jenis Peraturan Desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Penulis menemukan peraturan desa yang telah dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa hanya Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang APBDes tahun anggaran 2013 dimana Peraturan Desa tersebut termasuk jenis peraturan desa yang wajib untuk dibuat. BPD dan Kepala Desa telah melakukan tugas dan kewajibannya untuk membuat Peraturan Desa tersebut.

Dengan melihat hasil Peraturan Desa yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa sebelumnya, kinerjanya dapat dikatakan kurang baik, karena tidak kesemua Jenis Peraturan dibuat Peraturan Desa yang baru alangkah baiknya jika pada Peraturan yang berdasar pada kondisi Sosial, untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat serta permasalahan di Desa selama ini semakin rumit dan bersifat kompleks di era zaman yang semakin serga sulit akan tekanan dari pemerintah pusat dan semakin modernnya tingkat globalisasi, BPD dan Kepala Desa seharusnya lebih gerak cepat didalam menyesuaikan serta menyelesaikannya. Di lapangan penulis juga melihat warga desa Selorejo itu sendiri yang kurang aktif dalam memanfaatkan haknya sebagai warga desa yang berhak mengajukan

usulan dan pendapat mengenai pembentukan peraturan desa. Seakan mereka hanya menunggu apa yang dihasilkan BPD dan Kepala Desanya.

b) Outcome Peraturan Desa yang dihasilkan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Pada hasil Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang APBDes, terdapat fungsi kontrol, peraturan ini mengontrol pengalokasian dan penggunaan uang kas desa, dengan adanya pengaturan keuangan kas desa kepada pos-pos yang jelas, maka secara tidak langsung akan memperlancar pembangunan dan kesejahteraan yang sudah direncanakan. Sedangkan fungsi koordinasi juga dapat tergambar dalam peraturan desa tersebut saat proses sosialisasi dilakukan mengenai penggunaan dana bantuan desa dari daerah.

Dengan mengambil contoh Peraturan Desa di atas, maka dapat kita lihat bahwa produk Peraturan Desa yang disahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa bukan semata-mata karena adanya dominasi Kepala Desa, keputusan yang diambil dalam Peraturan Desa tersebut sudah mewakili komponen yang ada. Kepentingan dan masukan dari masyarakat desa yang beragam harus dapat disatukan dan diwujudkan dalam sebuah Peraturan Desa melalui mekanisme penyusunan yang tepat sasaran dan benar. Semua elemen masyarakat aspirasinya disampaikan, walaupun belum ataupun ditunda itu dikarenakan adanya skala prioritas dalam program yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

- c. Faktor penghambat dan pendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa didalam pembentukan peraturan desa

a) Faktor Pendukung

Dari beberapa faktor pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa yang sudah disebut dan jelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung yang merupakan kunci dari lancarnya proses penyusunan peraturan desa ini adalah baiknya hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai pimpinan dari pemerintahan desa serta hubungan yang baik dengan masyarakat desa.

b) Faktor Penghambat

Dari beberapa faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa dalam penyusunan peraturan desa yang sudah disebut dan jelaskan diatas, hal utama yang menjadi penghambat adalah masih terjadinya dominasi kinerja kepala desa didalam proses penyusunan peraturan desa, dan dinilai masih kurang aktifnya peran masyarakat desa didalam penyusunan peraturan desa.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini menjadi bagian penting didalam menjalankan proses otonomi daerah khususnya pada strata pedesaan, sehingga dituntut adanya upaya peningkatan sumber daya manusia yang secara khusus ditujukan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan secara umumnya untuk pemerintah desa yang berada di Desa Selorejo, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh BPD maupun pemerintah desa.

Dari Permasalahan-permasalahan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran, antara lain:

- 1) Penulis memberikan saran penjaringan anggota pemerintah desa maupun BPD haruslah diseleksi dan dipersiapkan dengan tepat, tepat dalam hal ini digambarkan dengan lebih ditingkatkannya mutu dan kualitas para anggotanya nanti, dikarenakan semakin berkembangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat di desa, maka Aparat Pemerintahnya harus lebih bagus lagi baik dalam hal pendidikan maupun penguasaan atas jabatan yang ditanggungnya dalam menjalankan pemerintah desa, diharapkan dengan semakin bagusnya kualitas aparat yang ada di dalam pemerintah desa dapat memberikan hasil yang optimal di dalam kenyataannya sehingga tidak meleset dengan harapan masyarakat desa.
- 2) Penulis menyarankan perlu adanya peningkatan kemampuan dari para pengurus BPD dalam hal penambahan ide-ide baru. Misalnya di kantor BPD harus sudah dilengkapi dengan sarana-prasarana untuk mendapatkan informasi terbaru seputar peraturan dan pelaksanaan pemerintahan desa di daerah lain, baik itu berupa alat elektronik ataupun sarana informasi yang mendukung lainnya.
- 3) Penulis memberikan saran kinerja BPD dan Kepala Desa dalam proses Penyusunan Peraturan Desa dari awal sampai akhir harus bekerja lebih optimal dari yang ada pada saat ini, penulis menyarankan Peraturan Desa yang telah berjalan harus sesuai dan benar-benar di rasakan dampak perubahan yang lebih baik oleh masyarakat desa. Dominasi Kepala Desa diharapkan tidak terjadi kembali di kemudian hari karena pada dasarnya

Peraturan Desa yang dibuat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, kearah yang lebih baik dan sejahtera.

- 4) Hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menurut penulis harus terbina dan terjaga dengan lebih baik, karena keduanya adalah penentu keputusan dalam penyusunan Peraturan Desa dengan cara bersama-sama untuk berpartisipasi didalam upaya membangun desa, seperti mengadakan diskusi dengan masyarakat yang diadakan rutin seminggu atau sebulan sekali di desa.
- 5) Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dirasa belum cukup, alangkah baiknya Peraturan yang dibuat berdasarkan pada kondisi Sosial, dan Budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat serta masalah yang timbul di Desa semakin sulit. Disarankan peran anggota BPD dan warga Desa lebih produktif dalam menyampaikan aspirasi mereka, karena memang disitulah sebenarnya fungsi BPD secara menyeluruh, yakni sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam Penyusunan Peraturan Desa.
- 6) Penulis menyarankan agar peraturan desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa lebih berinovatif dan berbeda dari tiap tahunnya, bukan hanya peraturan desa yang bersifat mutlak dari perundang-undangan saja yang dibuat tetapi juga harus benar-benar berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa yang semakin kompleks dengan himpitan ekonomi yang semakin menjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Anthony, R.N. 1990. *Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Agus Mahendra*. Jakarta : Erlangga

Chandler, R.C. & J.P. Petter. 1988. *The Public administration Dictionary*. Second Edition.

Donovan, F. Dan A.C. Jackson. 1991. *Managing human services organizations*. New York, N.Y.: Prentice Hall.

Dwiyanto, A. 2007. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke*

Governance, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Universitas Gadjah Mada, *Dari Administrasi Negara ke*

Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Harbani, Pasolong,. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Haryanto, Dany dan Nugrohadhi, Edwi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Jimung, Martin. 2005. *Politik local dan pemerintahan daerah dalam perspektif*

otonomi daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Jha, S,N, dan Mathur, PC (eds), 1999. *Decentralization and local Politics; Reading In Indian Government and Politics-2*. New delhi London: Sage Publications.

Keban, Yermias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media

Lemay. M.C. 2002. *Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy*. Belmont, CA:

Wardsworth/Thompson Learning. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta :Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BPD

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 15 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah